

**ANALISIS DAYA SAING USAHA PETERNAKAN SAPI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MUHAMMAD ILHAM
105960190715**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal yang berjudul **Analisis Daya Saing Usaha Peternakan Di Provinsi Sulawesi Selatan** adalah benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau di kutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah di sebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir proposal ini.



Makassar , 23 April 2019

Muhammad Ilham

105960190715

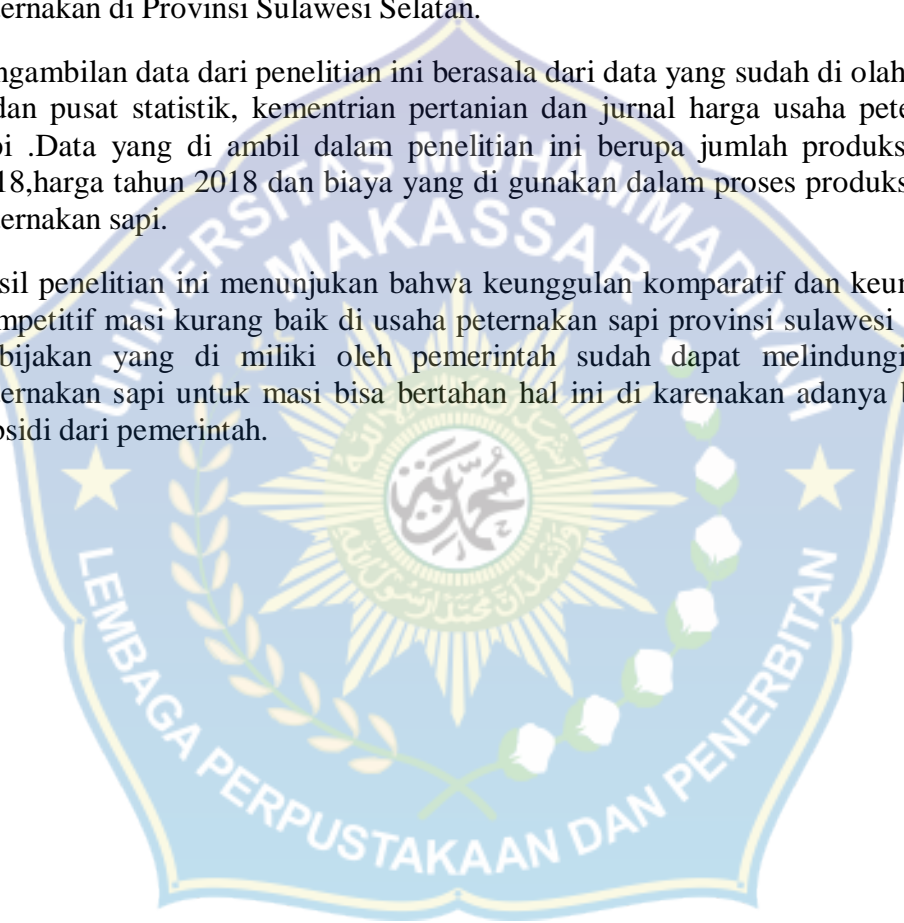
ABSTRAK

MUHAMMAD ILHAM.105960190715. Analisis Daya Saing Usaha Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Ibunda Sri Mardiyati dan Ayahanda Saleh Molla.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya saing keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap usaha peternakan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengambilan data dari penelitian ini berasal dari data yang sudah di olah seperti badan pusat statistik, kementerian pertanian dan jurnal harga usaha peternakan sapi .Data yang di ambil dalam penelitian ini berupa jumlah produksi tahun 2018,harga tahun 2018 dan biaya yang di gunakan dalam proses produksi usaha peternakan sapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif masi kurang baik di usaha peternakan sapi provinsi sulawesi selatan. Kebijakan yang di miliki oleh pemerintah sudah dapat melindungi usaha peternakan sapi untuk masi bisa bertahan hal ini di karenakan adanya bantuan subsidi dari pemerintah.



HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Daya Saing Usaha Peternakan Sapi Provinsi
Sulawesi Selatan

Nama : Muhammad Ilham

Stambuk : 105960190715

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sri Mardiyati, S.P.,M.P
Molla.M.M.
NIDN: 0921037003

Ir. H. Saleh
NIDN: 0931126113

Diketahui

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Prodi Agribisnis

H. Burhanuddin,S.Pi.,M.P
Mardiyati,S.P.,M.P
NIDN: 0912066901

Dr.

Sri

NIDN: 0921037003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Analisis Daya Saing Usaha Peternakan Sapi Di Provinsi

Sulawesi Selatan

Nama : Muhammad Ilham

Stambuk : 105960190715

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P.
Ketua Sidang

2. Ir. H. Saleh Molla, M.M.
Sekretaris

3. Dr. Ir. Nurdin, M.M.
Anggota

4. Nadir, S.P., M.Si.
Anggota

Tanggal Lulus :

KATA PENGANTAR

Segala puji atas nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini.

Proposal ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan proposal ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan proposal ini.

Akhir kata kami berharap semoga Proposal Analisis Daya Saing Usaha Peternakan Sapi Di Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Makassar 23-April-2019

Muhammad Ilham
105960190715

RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Ujung Pandang 12 Desember 1996 dari ayah Alwinuddin dan Ibunda Jumriati. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersodara

Pendidikan formal yang di lalui penulis adalah SMK DARUSSALAM MAKASSAR dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun pertama penulis pernah bekerja di Bank BRI dan pada tahun kedua penulis baru melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah magang di PT. Jas Mulia pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara . Penulis juga selama mengikuti perkuliahan sering ikut dalam lomba akustik dan musikalisasi puisi antara fakultas se UNISMUH .

Selain itu penulis juga aktif menjadi pengurus pikom IMM Fakultas Pertanian Priode 2016/2017 sebagai anggota departemen Seni Budaya dan Olah Raga IMM, Pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Agribisnis Priode 2017/2018 sebagai Kepala bidang Minat dan Bakat dan Pernah juga menjadi pengurus BEM Fakultas Pertanian priode 2018/2019 sebagai ketua bidang Minat dan Bakat. Tugas akhir dalam pendidikan tinggi diselesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul Analisis Daya Saing Usaha Peternakan Sapi Provinsi Sulawesi Selatan.



DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL.....	I
HALAMAN PERNYATAAN	
.....	II
HALAMAN	
ABSTRAK.....	III
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN	
PENGUJI.....	V
KATA	
PENGANTAR.....	VI
RIWAYAT	
HIDUP.....	VII
DAFTAR	
ISI.....	VIII
DAFTAR	
TABEL.....	XI
DAFTAR	
GAMBAR.....	XII
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Komoditas Usaha Peternakan.....	10
2.2. Daya Saing	14
2.3. Daya Saing Produk Pertanian.....	15
2.4. Kebijakan yang Mempengaruhi Pertanian.....	16
2.5. Keunggulan Komparatif	19
2.6. Keunggulan Kompetitif	22
2.7. Policy Analysis Matrix (PAM)	23
2.8. Kerangka Pikir.....	35
2.9. Hipotesis	36
III. METODE PENELITIAN	37
3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	37
3.2. Jenis Dan Sumber Data.....	37
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4. Metode Analisis Data	38
3.5. Defenisi Oprasional Variable	38
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
4.1. Kondisi Geografis.....	41
4.2. Kondisi Demografis.....	42

VI. HASIL PEMBAHASAN	45
5.1. Daya Saing Usaha Peternakan Sapi.....	45
5.1.1. Analisis PAM Usaha Peternakan Sapi Potong	45
5.1.2. Analisis Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Usaha Peternakan Sapi Potong Provinsi Sulawesi Selatan.....	46
5.1.3. Analisis PAM Usaha Peternakan Sapi perah.....	48
5.1.4. Analisis Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Usaha Peternakan Sapi Perah Provinsi Sulawesi Selatan.....	49
5.2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Peternakan Sapi	52
5.2.1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Peternakan Sapi Potong	52
5.2.2. Analisis Kebijakan Usaha Peternakan Sapi Perah Provinsi Sulawesi Selatan.....	59
6.1. Kesimpulan	67
6.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

1.Populasi Ternak Nasional Tahun 2014-2018.....	5
2.Produksi Sapi Perah Nasional Tahun 2014-2018.....	6
3.Populasi Ternak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018.....	6
4.Produksi Ternak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018	7
5.Matriks Analisis Kebijakan (<i>Policy Matrix Analisis/PAM</i>).....	31
6.Analisis PAM Usaha Peternakan Sapi Potong.....	43
7.Analisis PAM Usaha Peternakan Sapi Perah.....	55



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir Analisis Daya Saing Dan Kebijakan Usaha Peternakan Sap.25





I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya dan suatu produksi yang has berdasarkan sumber tanaman dan hewan petani mengolah dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani di mana kegiatan produksi merupakan bisnis sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting (Mosher , 1996).

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk

meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto (BPS ,2002).

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja, memelihara dan beternak perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan lain-lain. Peternakan adalah bagian dari sektor pertanian yang merupakan sub sektor yang penting dalam menunjang perekonomian masyarakat . Komoditas peternakan mempunyai prospek yang baik untuk di kembangkan .Hal ini di dukung oleh karakteristik produk yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan pasar potensial bagi agribisnis peternakan. Beberapa peluang agribisnis dalam mengembangkan agribisnis peternakan adalah pertama jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa merupakan konsumen yang sangat besar dan masi juga bertumbuh 1,4% pertahunnya. Kedua kondisi geografis sumberdaya alam yang mendukung usaha dan usaha peternakan . Ketiga meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap gizi yang baik. Keempat jika pemulihan ekonomi berjalan baik maka akan meningkatnya

pendapatan perkapita yang kemudian akan menaikkan daya beli masyarakat (Yunus, 2009).

Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, itu menunjukkan bahwa sektor pertanian berperan besar dalam menopang perekonomian dan memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia kedepannya. Dalam membangun pertanian yang mampu berdaya saing tinggi, di butuhkan petani yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pertanian dalam arti luas juga melibatkan peternakan dan peternakan di Indonesia cukup baik. Indonesia sebagai negara agraris masih cukup memiliki lahan pertanian yang subur lengkap dan keanekaragaman hayatinya dan sebagian besar penduduknya adalah petani untuk bekerja di sektor pertanian baik itu usaha pertanian ataupun agribisnis peternakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2009, jumlah petani mencapai 44 % dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 46,7 juta jiwa (BPS , 2009).

Usaha peternakan di Indonesia telah dikenal sejak dahulu kala. Namun pengetahuan tentang kapan dimulainya proses domestikasi dan pembudidayaan ternak dari hewan liar, masih langka. Adanya bangsa ternak asli di seluruh Indonesia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik, memberikan petunjuk bahwa penduduk pertama Indonesia telah mengenal ternak sekurang-kurangnya melalui pemanfaatannya sebagai hasil perburuan. Dengan kedatangan bangsa-bangsa Cina, India, Arab, Eropa dan lain-lain, maka ternak sapi yang dibawa serta bercampur darah dengan ternak asli. Terjadilah kawin

silang yang menghasilkan ternak keturunan atau peranakan dipelbagai daerah Indonesia. Disamping itu, dalam jumlah yang banyak masih terdapat ternak asli. Dengan demikian terjadilah tiga kelompok besar bangsa ternak yaitu kelompok pertama adalah bangsa ternak yang masih tergolong asli, ialah ternak yang berdarah murni dan belum bercampur darah dengan bangsa ternak luar. Kelompok kedua adalah kelompok "peranakan", yaitu bangsa ternak yang telah bercampur darah dengan bangsa ternak luar. Kelompok ketiga adalah bangsa ternak luar yang masih diperkembang-biakan di Indonesia, baik murni dari satu bangsa atau yang sudah bercampur darah antara sesama bangsa ternak "luar" tersebut. Bangsa ternak demikian dikenal dalam dunia peternakan sebagai ternak "ras" atau ternak "negeri". Tahapan waktu didalam mempelajari sejarah usaha peternakan di Indonesia, disesuaikan dengan perjalanan sejarah, untuk melihat perkembangan usaha peternakan dalam kurun waktu suatu tahap sejarah. pendapatan peternak dipengaruhi oleh jumlah ternak yang dipelihara, semakin banyak ternak yang dipelihara, semakin banyak keuntungan yang akan diterima oleh peternak (Hadi, 2002).

Konsumsi pangan asal ternak daging sapi ataupun susu sapi dari tahun ketahun terus meningkat konsumsi daging di Indonesia juga terus meningkat merupakan indikasi meningkatnya peluang bagi agribisnis peternakan ternak sapi potong merupakan sumber protein yang baik bagi masyarakat Ternak sapi juga memiliki produk lain seperti susuh sapi perah. Sapi potong dan perah di Indonesia telah lama di pelihara oleh masyarakat indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan usaha peternakanya ini adalah usaha rakyat untuk meningkatkan peternakan

di Indonesia itu sendiri hasil analisis yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa hingga saat ini pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia secara umum masih didominasi oleh pangan sumber karbohidrat atau pangan nabati. Pada tahun 2014, konsumsi protein nabati masih dominan yaitu 68,9% dari total protein, yang berarti konsumsi protein hewani sekitar 31,1%. Keadaan enam tahun lalu lebih buruk, yaitu konsumsi protein hewani hanya 26,6% dari total konsumsi protein (BKP 2015).

Permasalahan dalam pengembangan usaha peternakan di Indonesia adalah produktivitas ternak masih rendah sumber daya manusia yang masih kurang produktivitas dan tingkat pengetahuan yang rendah dan tingginya biaya dalam melakukan usaha peternakan sapi sehingga membuat masyarakat Indonesia yang bergerak dalam usaha peternakan masih sangat kurang. Permasalahan usaha sapi potong dan sapi perah tersebut mengakibatkan belum tercukupinya usaha peternakan sapi dalam negeri. Hasil kajian Ilham (2009) menunjukkan selama 40 tahun terakhir industri sapi potong Indonesia mengalami dinamika yang arahnya cenderung negatif, padahal pada dasawarsa 1979-1980 Indonesia merupakan negara eksportir sapi potong (Bentara Online, 2009). Memasuki dasawarsa 1980-1990 pemerintah mengambil kebijakan penghentian ekspor sapi potong dan kerbau (Ditjenak, 1990).

Program swasembada daging sapi tahun 2014 merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam lima tahun kedepan untuk menguji ketahanan pangan asal ternak berbasis sumberdaya lokal. Pencapaian swasembada daging sapi merupakan tantangan terbesar. Pada tahun 2009 impor

daging sapi mencapai 70 ribu ton angka ini meliputi 30% dari kebutuhan daging nasional. Bahkan ada kecenderungan volume impor terus meningkat 720 ribu ekor pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mengakibatkan kemandirian dan kecenderungan pangan hewani khususnya daging sapi semakin jauh dari harapan dan menyebabkan Indonesia salah satu negara exportir pangan di dunia. Impor daging sapi yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan daging sapi di Indonesia hanya mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia yang bergerak dalam usaha agribisnis peternakan di daerah menurun harganya karena banyaknya sapi yang di impor dari luar negeri dan dapat merugikan perekonomian di Indonesia. Adapun tabel populasi dan produksi daging sapi dan sapi perah dalam rencana strategis kementerian pertanian 2010-2014 disebutkan ada empat target utama yang akan dicapai maupun dipertahankan, salah satu diantaranya adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan (Kementan, 2010). nasional dapat dilihat di Tabel.1.1 dibawah ini.

Tabel.1.1. Populasi Ternak Nasional Tahun 2014-2018

No	Spesies	Tahun (Populasi Ekor)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Daging Sapi	11.515	12.257	12.760	3.582	14.824
2	Sapi perah	374	458	475	488	597
3	Kerbau	2.086	1.931	1.933	2.000	1.305
4	Kambing	14.470	15.147	15.858	16.620	17.483
5	Domba	9.514	9.605	10.199	10.725	11.372

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014-2018)

Tabel.1.2. Produksi Sapi Perah Nasional Tahun 2014-2018

No	Spesies	Tahun (Ton)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Daging Sapi	497.669	506.661	518.484	486.320	496.302
2	Sapi perah	800.715	835.125	800.751	835.125	852.951

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014-2018).

Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki pengembangan usaha peternakan sapi yang cukup baik di karenakan banyaknya penduduk Sulawesi Selatan yang bergerak dalam agribisnis peternakan sapi populasi dan produksi sapi dan ternak lain dapat kita lihat di tabel 1.2 yang akan memperlihatkan potensi peternakan sapi yang besar yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel.1.3. Populasi Ternak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018

No	Spesies	Tahun (Populasi Ekor)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Daging Sapi	2.100.137	1.284.442	2.100.137	1.284.442	1.366.655
2	Sapi perah	1.464	1.515	1.410	1.515	1.529
3	Kerbau	108.674	108.546	108.674	108.546	115.449
4	Kambing	466.084	443.792	437.918	477.068	466.393
5	Domba	1.371	815	490	468	377

Angka Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014-2018).

Tabel .1.4. Produksi Ternak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Spesies	Tahun (TON)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Daging Sapi	17.241.00	19.365.00	18.450.00	19.876.00	20.671.00
2	Sapi perah	1.464.00	1.464.00	1.529.00	1.594.00	1.659.00
3	Kerbau	1.086.00	2981.00	2.969.00	2.969.00	2.969.00
4	Kambing	14.470.00	15.147.00	15.858.00	16.620.00	17.483.00
5	Domba	650	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik (2014-2018).

Dari tabel diatas kita dapat melihat bawah usaha peternakan di Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya tidak stabil

1.2. Rumusan Masalah

Usaha peternakan sapi yang menjadi target swasembada daging sapi nasional adalah daging sapi dan susu perah. Meski demikian, untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional komoditas peternakan sapi impor. Dalam rangka melindungi petani dalam negeri pemerintah melaksanakan kebijakan tarif impor, pajak dan subsidi. Kebijakan ini akan mempengaruhi nilai jual komoditas daging sapi dan susu perah dalam negeri. Selain itu harga komoditas dalam negeri dan keuntungan usahatani sensitif terhadap perubahan harga internasional dan perubahan harga input produksi. Berdasarkan kondisi tersebut usaha peternakan daging sapi dan susu perah dalam negeri dan di Provinsi Sulawesi Selatan harus memiliki daya saing dengan produk internasional untuk komoditas serupa dipasar dalam negeri. Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang ada, maka perlu dikaji bagaimana daya saing usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan dapat di lihat dibawah ini:

1. Bagaimanadaya saing peternakan sapi (sapi potong dan sapi perah) di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan (sapi Potong dan sapi perah).

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menganalisis daya saing usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan adapun tujuan penelitian dapat di lihat di bawah ini:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanadaya saing peternakan sapi potong dan sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan (sapi Potong dan sapi perah).



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komoditas Usaha Peternakan

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (bahasa Inggris: crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang-bidang di lingkup pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari PDB dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor - sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2002, bidang pertanian di Indonesia menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 44,3% penduduk meskipun hanya menyumbang sekitar 17,3% dari total pendapatan domestik bruto (Mosher , 1996).

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Pengertian peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan

saja, memelihara dan beternak perbedaannya terletak pada tujuan yang¹ ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedang kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci dan lain-lain (Yunus, 2009).

Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, itu menunjukkan bahwa sektor pertanian berperan besar dalam menopang perekonomian dan memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia kedepannya. Dalam membangun pertanian yang mampu berdaya saing tinggi, di butuhkan petani yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pertanian dalam arti luas juga melibatkan peternakan dan peternakan di Indonesia cukup baik. Indonesia sebagai negara agraris masih cukup memiliki lahan pertanian yang subur lengkap dan keanekaragaman hayatinya dan sebagian besar penduduknya adalah petani untuk bekerja di sektor pertanian baik itu usaha pertanian ataupun agribisnis peternakan (BPS, 2009).

Usaha peternakan di Indonesia telah dikenal sejak dahulu kala. Namun pengetahuan tentang kapan dimulainya proses domestikasi dan pembudidayaan ternak dari hewan liar, masih langka. Adanya bangsa ternak asli di seluruh Indonesia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam dan itik, memberikan petunjuk bahwa penduduk pertama Indonesia telah mengenal

ternak sekurang-kurangnya melalui pemanfaatannya sebagai hasil perburuan. Dengan kedatangan bangsa-bangsa Cina, India, Arab, Eropa dan lain-lain, maka ternak kuda dan sapi yang dibawa serta bercampur darah dengan ternak asli. Terjadilah kawin silang yang menghasilkan ternak keturunan atau peranakan dipelbagai daerah Indonesia. Disamping itu, dalam jumlah yang banyak masih terdapat ternak asli. Dengan demikian terjadilah tiga kelompok besar bangsa ternak yaitu kelompok pertama adalah bangsa ternak yang masih tergolong asli, ialah ternak yang berdarah murni dan belum bercampur darah dengan bangsa ternak luar. Kelompok kedua adalah kelompok "peranakan", yaitu bangsa ternak yang telah bercampur darah dengan bangsa ternak luar. Kelompok ketiga adalah bangsa ternak luar yang masih diperkembang-biakan di Indonesia, baik murni dari satu bangsa atau yang sudah bercampur darah antara sesama bangsa ternak "luar" tersebut. Bangsa ternak demikian dikenal dalam dunia peternakan sebagai ternak "ras" atau ternak "negeri".

Pentahapan waktu didalam mempelajari sejarah usaha peternakan di Indonesia, disesuaikan dengan perjalanan sejarah, untuk melihat perkembangan usaha peternakan dalam kurun waktu suatu tahap sejarah. Didalam kurun waktu tersebut dapat dipelajari sejauh mana pemerintah dikala itu memperhatikan perkembangan bidang peternakan atau segi pemanfaatan ternak oleh penduduk diwaktu itu (Hadi , 2002).

Konsumsi pangan asal ternak daging sapi ataupun susu sapi dari tahun ketahun terus meningkat konsumsi daging di Indonesi juga terus meningkat merupakan indikasi meningkatnya peluang bagi agribisnis peternakan ternak sapi potong merupakan sumber protein yang baik bagi masyarakat Ternak sapi

juga memiliki produk lain seperti susu sapi perah . Sapi potong dan perah di Indonesia telah lama di pelihara oleh masyarakat indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan usaha peternaknya ini adalah usaha rakyat untuk meningkatkan peternakan di Indonesia itu sendiri (BKP , 2015).

Permasalahan dalam pengembangan usaha peternakan di Indonesia adalah produktiitas ternak masih rendah sumber daya manusia yang masih kurang produktiitas dan tingkat pengetahuan yang rendah dan tingginya biaya dalam melakukan usaha peternakan sapi sehingga membuat masyarakat Indonesia yang bergerak dalam usaha peternakan masih sangat kurang Permasalahan usaha sapi potong dan sapi perah tersebut mengakibatkan belum tercukupinya usaha peternakan sapi dalam negeri .Hasil kajian Ilham (2009) menunjukkan selama 40 tahun terakhir industri sapi potong indonesia mengalami dinamika yang arahnya cenderung negatip. padahal pada dasawarsa 1979-1980 indonesia merupakan negara eksportir sapi potong (Bentara Online, 2009). Memasuki dasawarsa 1980-1990 pemerintah mengambil kebijakan penghentian ekspor sapi potong dan kerbau (Ditjenk, 1990).

Program swasembada daging sapi tahun 2014 merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam lima tahun kedepan untuk mengujutkan ketahanan pangan asal ternak berbasis sumberdaya lokal . Pencapaian swasembada daging sapi merupakan tantangan terbesar. Pada tahun 2009 impor daging sapi mencapai 70 ribu ton angka ini meliputi 30%dari kubutuhan daging nasional. Bahkan ada kecenderungan volume impor terus meningkat 720 ribu ekor pada tahun-tahun mendatang. Hal ini mengakibatkan kemandirian dan

kecenderungan pangan hewani khususnya daging sapi semakin jauh dari harapan dan menyebabkan Indonesia salah satu negara exportir pangan di dunia Impor daging sapi yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan daging sapi di Indonesia hanya mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia yang bergerak dalam usaha agribisnis peternakan di daerah menurun harganya karna banyaknya sapi yang di impor dari luar negeri dan dapat merugikan perekonomian di Indonesia(Kementan, 2010).

2.2. Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditi untuk bersaing di pasar luar negeri atau kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar dalam negeri dan bersaing dengan komoditas dari luar negeri. Jika suatu produk mempunyai daya saing maka produk banyak diminati oleh banyak konsumen. Simanjuntak menyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan produsen untuk memproduksi suatu komoditi dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga – harga yang terjadi di pasar internasional kegiatan produksi tersebut menguntungkan (Michael Porter , 1990).

Daya saing suatu komoditi dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi usahatani. Tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Pendekatan daya saing dapat dilihat dari dua indikator keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Masing – masing keunggulan menunjukkan efisiensi penggunaan faktor produksi usahatani. (Michael Porter , 1990).

2.3. Daya Saing Produk Pertanian

Sektor pertanian nasional menghasilkan komoditas dan produk yang memiliki keragaman tinggi, baik dalam kualitas (jumlah produk, jenis komoditas dan produk), maupun dalam hal kualitas. Namun demikian, keragaman tersebut dapat dianggap sebagai tantangan untuk meningkatkan daya saing sector melalui seleksi jenis komoditas dan produk yang mampu bersaing di pasar global. Karena daya saing sector pada umumnya memiliki dimensi vertikal (eksternal) dan horizontal (kekuatan lingkungan strategis, khususnya lingkungan usaha), maka konsep daya saing dapat digunakan untuk menyeleksi peluang kompetisi atau peluang ekspor untuk komoditas-komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif (Cuevas , 2004).

Daya saing hortikultura Indonesia juga masih lemah karena selain kualitasnya kalah bersaing dengan produk impor, juga karena kelemahan sumber daya manusia dan budaya yang belum siap untuk menggunakan inovasi teknologi pendorong produksi hortikultura. Usahatani hortikultura juga belum dilakukan secara komersial, namun masih terpencar-pencar, dilakukan sebagai kegiatan sampingan, dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada petani hortikultura. Preferensi konsumen produk hortikultura termasuk buah dan sayuran belum sepenuhnya dipertimbangan untuk memperkuat kemampuan daya saing menyarankan bahwa analisis daya saing sektor pertanian melihat juga analisis harga, subsidi ekspor, dan proteksi impor (Elekes ,2002)

Komoditas peternakan mengalami defisit perdagangan dan menunjukkan ketidak mampuan dalam berdaya saing dengan peternakan negara lain. Hanya ternak babi, tepung tulang, vaksin dan asam amino yang mampu bersaing dengan perusahaan di luar negeri. Industri unggas Indonesia belum mampu bersaing di dunia karena industri unggas tidak terintegrasi secara vertical, tetapi terfragmentasi menjadi berbagai perusahaan dan peternak yang masing-masing usaha dikerjakan untuk mendapat keuntungan. Industri unggas harus didorong melakukan restrukturisasi usahanya menjadi perusahaan yang terintegrasi secara vertical melalui berbagai cara dan dukungan kebijakan (Yunus, 2009).

Dalam menghadapi tantangan persaingan pasar global, tidak semua komoditas didorong untuk memiliki daya saing dengan negara lain. Jika komoditas diminati oleh pasar dalam negeri maka peningkatan produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebaliknya, jika komoditas yang belum berdaya saing dan kurang diminati konsumen dalam negeri perlu dilakukan peningkatan daya saing untuk ekspor. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian melalui pengembangan teknologi, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal dan efisien serta mengurangi hambatan ekspor (Cuevas , 2004).

2.4. Kebijakan yang Mempengaruhi Pertanian

Kebijakan yang mempengaruhi pertanian dapat digolongkan kepada tiga kategori yaitu kebijakan harga, kebijakan makroekonomi dan kebijakan

investasi publik. Ketiga kategori kebijakan tersebut dilakukan melalui instrumen seperti subsidi, hambatan perdagangan internasional dan pengawasan atau pengendalian langsung. Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan kebijakan yang bersifat spesifik komoditas. Setiap kebijakan diterapkan untuk satu komoditas (misalnya beras). Kebijakan harga juga bisa mempengaruhi input pertanian. Setiap instrumen kebijakan harga pertanian akan menimbulkan transfer antara produsen, konsumen dan pemerintah Ketiga kategori kebijakan tersebut yaitu (Kementerian Pertanian , 2015).

a. Kebijakan Harga

Pajak dan subsidi atas komoditas pertanian menyebabkan terjadinya transfer anggaran pemerintah kepada produsen dan konsumen. Pajak mengalirkan sumberdaya kepada pemerintah, sedangkan subsidi mengalirkan sumberdaya yang berasal dari pemerintah. Hambatan perdagangan internasional seperti pajak dan tarif yang sifatnya membatasi impor atau ekspor. Hambatan perdagangan dan kebijakan harga ini mengubah tingkat harga dalam negeri (Kementerian Pertanian , 2015).

Pengendalian langsung adalah peraturan pemerintah atas harga margin pemasaran atau hilangnya kebebasan untuk memilih tanaman. Biasanya kebijakan hambatan langsung harus disertai dengan kebijakan hambatan perdagangan dan kebijakan pajak/subsidi agar kebijakan tersebut bisa efektif. (Kementerian Pertanian , 2015).

b. Kebijakan Makro dan Kebijakan Mikro

ekonomi yang mempengaruhi sektor pertanian yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan harga faktor domestik, sumberdaya alam dan tataguna lahan. Pemerintah sering kali menerapkan kebijakan makro ekonomi yang bisa mempengaruhi nilai input produksi pertanian (sewa lahan, upah tenaga kerja, tingkat bunga yang berlaku). Kebijakan makro ekonomi tersebut dapat mempengaruhi biaya produksi pertanian (Kementerian Pertanian, 2015).

c. Kebijakan Investasi Publik

Kebijakan investasi publik yang mempengaruhi pertanian adalah investasi publik yang didanai dari anggaran pemerintah khususnya dibidang infrastruktur (barang modal seperti jalan, pelabuhan, jaringan irigasi dll), sumberdaya manusia, serta penelitian dan pengembangan teknologi. Investasi dalam bentuk infrastruktur dapat meningkatkan pendapatan usahatani atau menurunkan biaya produksi. Investasi publik dalam sumberdaya manusia antara lain pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan keahlian atau ketrampilan serta kondisi kesehatan produsen dan konsumen. Contoh dalam bidang pertanian merupakan kegiatan penyuluhan pertanian. Investasi publik dalam bentuk penelitian dan pengembangan teknologi seperti penggunaan benih unggul, penemuan pupuk baru, teknik pengolahan pertanian baru dll. Investasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen. Negara yang memiliki pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi biasanya melakukan investasi yang besar di bidang riset dan budaya

pertaniannya untuk mengadopsi teknologi yang dihasilkan oleh lembaga riset internasional (Kementerian Pertanian , 2015).

2.5. Keunggulan Komparatif

Dasar teori perdagangan internasional merupakan pemikiran kaum Merkantilis yang menyatakan cara terpenting untuk menjadi negara kaya adalah mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Teori keunggulan absolut menurut Adam Smith membantah pandangan kaum Merkantilis dengan pendapat bahwa perdagangan bebas dapat menjadikan suatu negara memiliki spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut (dapat memproduksi lebih efisien dibanding negara – negara lain). Suatu negara dapat melakukan ekspor komoditi yang mengalami keunggulan absolut dan melakukan impor komoditi yang memiliki kerugian absolut memproduksi komoditi dengan cara yang kurang efisien (Menurut David Ricardo, 1997).

Negara kurang efisien atau tidak unggul secara absolut dalam memproduksi komoditi, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat dilakukan. Negara yang kurang efisien akan melakukan spesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang mempunyai kerugian komparatif lebih kecil. Negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari komoditi mempunyai kerugian komparatif lebih kecil. Negaratersebut sebaliknya mengimpor komoditi yang memiliki kerugian komparatif yang lebih besar (David Ricardo, 1817) .

Perdagangan antar negara akan timbul apabila masing – masing negara memiliki *comparativecost* yang terkecil. Sebagai contoh Portugis dan Inggris yang sama samamemproduksi anggur dan pakaian (David Ricardo, 1817).

Dalam hal ini Portugis akan berspesialisasi pada produksi anggur, sedangkan Inggris pada produksi pakaian. Pada nilai tukar 1 botol anggur sama dengan 1 yard pakaian maka Portugis akan mengorbankan 3 hari kerja untuk 1 yard pakaian yang apabila diproduksi sendiri memerlukan waktu 4 hari kerja. Inggris juga akan beruntung dari pertukaran dengan spesialisasi pada produksi pakaian dan ditukar dengan anggur maka untuk memperoleh 1 botol anggur hanya dikorbankan 5 hari kerja yang kalau diproduksi sendiri memerlukan waktu 6 hari kerja (David Ricardo, 1817).

Berdasarkan teori tersebut apabila suatu negara tidak lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi komoditi, negara tersebut masih dapat melakukan perdagangan internasional. Negara tersebut dapat melakukan ekspor yang menguntungkan dan melakukan impor untuk mengurangi ketidak efisienan memproduksi suatu komoditi. Dalam hal ini Portugis akan berspesialisasi pada produksi anggur, sedangkan Inggris pada produksi pakaian. Pada nilai tukar 1 botol anggur sama dengan 1 yard pakaian maka Portugis akan mengorbankan 3 hari kerja untuk 1 yard pakaian yang apabila diproduksi sendiri memerlukan waktu 4 hari kerja. Inggris juga akan beruntung dari pertukaran dengan spesialisasi pada produksi pakaian dan ditukar dengan anggur maka untuk memperoleh 1 botol anggur hanya dikorbankan 5 hari kerja yang kalau diproduksi sendiri memerlukan waktu 6 hari kerja (David Ricardo, 1817).

Berdasarkan teori tersebut apabila suatu negara tidak lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi komoditi, negara tersebut masih dapat melakukan perdagangan internasional. Negara tersebut dapat melakukan ekspor yang menguntungkan dan melakukan impor untuk mengurangi ketidak efisienan memproduksi suatu komoditi (David Ricardo, 1817).

Ekspor komoditi yang secara relatif mempunyai faktor produksi berlimpah dan murah, serta mengimpor komoditi yang faktor produksinya relatif jarang atau (langka) dan mahal. Teori Heckscher-Ohlin menekankan pentingnya biaya faktor produksi yang mendorong suatu negara melakukan ekspor atau impor. Disamping faktor lain yang mempengaruhi latar belakang perdagangan internasional, faktor biaya dan keuntungan menjadi pertimbangan penting karena kegiatan ekspor – impor tersebut dilakukan oleh unit ekonomi antar negara yang saling berorientasi pada keuntungan (David Ricardo, 1817).

Keunggulan komparatif merupakan konsep yang diterapkan suatu negara untuk membandingkan beragam aktivitas produksi dan perdagangan di dalam negeri terhadap perdagangan dunia. Definisi tersebut menerangkan bahwa biaya produksi dinyatakan dalam nilai sosial dan harga komoditas diukur pada tingkat harga di pelabuhan yang berarti juga berupa harga bayangan. Dengan demikian, analisis keunggulan komparatif adalah analisis sosial dan bukan analisis privat Analisis biaya faktor produksi dalam keunggulan komparatif merupakan analisis biaya ekonomi (*social cost*). Begitupula dalam penerimaan (output) yaitu penerimaan sosial. Oleh karena itu baik harga input maupun harga output tidak dihitung menggunakan

komponen subsidi, pajak dan tarif yang mungkin terkandung dalam harga aktual di pasar. Berdasarkan teori tersebut pertimbangan efisiensi usahatani sangat menentukan keunggulan komparatif. Teori ini mendasari perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia terutama komoditas daging sapi yang hingga saat ini masih melakukan impor (David Ricardo, 1817).

2.6. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif merupakan perluasan dari konsep keunggulan komparatif yang menggambarkan kondisi daya saing suatu aktivitas pada kondisi perekonomian aktual. Teori keunggulan kompetitif menjelaskan kondisi daya saing pembangunan suatu negara yang kompetitif. Menurut teori ini, karakteristik perusahaan atau industri maju berskala internasional harus memiliki produk, proses dan keahlian, yang diperlukan untuk kelangsungan pengembangan sumber daya kompetitifnya. Selain itu investasi serta kebijakan suatu negara harus mendukung penciptaan teknologi baru. Perusahaan yang berada tingkat ini telah unggul secara kompetitif untuk bersaing dalam internasional (Day dan Wensley , 1988)

Berdasarkan teori keunggulan kompetitif tidak hanya faktor internal kegiatan produksi yang menentukan suatu komoditi memiliki keunggulan yang kompetitif di pasar internasional namun juga faktor eksternal seperti tingkat permintaan pasar dunia dan kebijakan baik dalam negeri maupun internasional. Ditengah persaingan dengan komoditi internasional, komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif merupakan komoditi yang

menguntungkan secara privat karena lima faktor tersebut telah terhitung dalam harga privat (Day dan Wensley , 1988).

Keunggulan komparatif dan kompetitif dapat dimiliki oleh suatu komoditi sekaligus, namun bisa saja suatu komoditi hanya memiliki salah satu keunggulan. Komoditi yang memiliki keunggulan komparatif tetapi tidak memiliki keunggulan kompetitif terjadi disebabkan karena adanya distorsi pasar atau adanya hambatan yang bersifat disintensif, misalnya perpajakan atau produsen administrasi yang menghambat aktivitas tersebut sehingga merugikan produsen (Day dan Wensley , 1988).

Sebaliknya suatu komoditi yang memiliki keunggulan kompetitif tapi tidak memiliki keunggulan komparatif dapat terjadi bila pemerintah memberikan proteksi terhadap komoditi yang dihasilkan, misalnya jaminan harga, perijinan dan kemudahan fasilitas lainnya (Day dan Wensley , 1988).

2.7. Policy Analysis Matrix (PAM)

Matriks Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Matrix/PAM*) digunakan untuk menganalisis keadaan ekonomi dari pemilik ditinjau dari sudut usaha swasta (*private profit*) dan sekaligus memberi ukuran tingkat efisiensi ekonomi usaha atau keuntungan sosial (*social profit*). Menurut Monke dan Pearson model PAM memberikan pemahaman lebih lengkap dan konsisten terhadap semua pengaruh kebijakan dan kegagalan pasar pada penerimaan (*revenue*), biaya – biaya (*cost*), dan keuntungan (*profit*) dalam produksi sektor pertanian secara luas. Tiga isu yang menyangkut prinsip-prinsip yang ditelaah dengan model PAM (Aisyah Nurayati , 2015).

1. Daya saing (*competitiveness*) dan tingkat profitabilitas pada usaha Peternakan.
2. Dampak kebijakan terhadap usaha Peternakan.
3. Pengaruh kebijakan penelitian pertanian pada perbaikan teknologi.

Model PAM merupakan hasil dari dua identitas perhitungan yaitu :

- a. Tingkat keuntungan atau profitabilitas merupakan perbedaan antara penerimaan dan biaya-biaya.
- b. Pengaruh penyimpangan atau divergensi (distorsi kebijakan dan kegagalan pasar) merupakan perbedaan antara parameter – parameter yang dihitung menggunakan harga privat dan harga sosial.

Tahapan dalam menggunakan metode PAM adalah :

1. Identifikasi input secara lengkap dari usaha peternakan sapi potong dan perah.
2. Memilah biaya ke dalam kelompok *tradeable* dan domestik.
3. Menentukan harga bayangan (*shadow price*) dari input dan output usahat peternakan sapi potong dan perah.
4. Menghitung penerimaan dari usaha peternakan sapi potong dan perah
5. Menghitung dan menganalisis berbagai indikator yang bisa dihasilkan

PAM. Menurut Monke *and* Pearson asumsi dasar

yang digunakan dalam membangun matriks PAM diantaranya :

1. Perhitungan berdasarkan harga privat (*Private cost*), yaitu harga yang benar-benar terjadi dan diterima oleh produsen dan konsumen atau harga yang benar-benar terjadi setelah adanya kebijakan.

2. Perhitungan berdasarkan harga sosial (*social price*) atau harga bayangan (*shadow price*), yaitu harga pada kondisi pasar persaingan sempurna atau harga yang terjadi apabila tidak ada kebijakan. Pada komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar internasional (*tradeable*), harga bayangan adalah harga yang terjadi di pasar Internasional.
3. Output dapat dipisahkan ke dalam komponen asing (*tradeable*) dan domestik (*non tradeable*).
4. Eksternalitas positif dan negatif dianggap saling meniadakan

Policy Analysis Matrix (PAM)

Matriks Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Matrix/PAM*) digunakan untuk menganalisis keadaan ekonomi dari pemilik ditinjau dari sudut usaha swasta (*private profit*) dan sekaligus memberi ukuran tingkat efisiensi ekonomi usaha atau keuntungan sosial (*social profit*). Menurut Monke dan Pearson (dalam Aprizal, 2013: 20–21), model PAM memberikan pemahaman lebih lengkap dan konsisten terhadap semua pengaruh kebijakan dan kegagalan pasar pada penerimaan (*revenue*), biaya – biaya (*cost*), dan keuntungan (*profit*) dalam produksi sektor pertanian secara luas. Tiga isu yang menyangkut prinsip-prinsip yang ditelaah dengan model PAM yaitu :

1. Daya saing (*competitiveness*) dan tingkat profitabilitas pada usaha Peternakan..
2. Dampak kebijakan terhadap usaha Peternakan.
3. Pengaruh kebijakan penelitian pertanian pada perbaikan teknologi.

Model PAM merupakan hasil dari dua identitas perhitungan yaitu :

- a. Tingkat keuntungan atau profitabilitas merupakan perbedaan antara penerimaan dan biaya-biaya.
- b. Pengaruh penyimpangan atau divergensi (distorsi kebijakan dan kegagalan pasar) merupakan perbedaan antara parameter – parameter yang dihitung menggunakan harga privat dan harga sosial.

Tahapan dalam menggunakan metode PAM adalah :

1. Identifikasi input secara lengkap dari usaha peternakan sapi potong dan perah.
2. Memilah biaya ke dalam kelompok *tradeable* dan domestik.
3. Menentukan harga bayangan (*shadow price*) dari input dan output usaha peternakan sapi potong dan perah.
4. Menghitung penerimaan dari usaha peternakan sapi potong dan perah.
5. Menghitung dan menganalisis berbagai indikator yang bisa dihasilkan PAM. Menurut Monke and Pearson asumsi dasar yang digunakan dalam membangun matriks PAM diantaranya :

1. Perhitungan berdasarkan harga privat (*Private cost*), yaitu harga yang benar-benar terjadi dan diterima oleh produsen dan konsumen atau harga yang benar-benar terjadi setelah adanya kebijakan.
2. Perhitungan berdasarkan harga sosial (*social price*) atau harga bayangan (*shadow price*), yaitu harga pada kondisi pasar persaingan sempurna atau harga yang terjadi apabila tidak ada kebijakan. Pada komoditas yang dapat

diperdagangkan di pasar internasional (*tradeable*), harga bayangan adalah harga yang terjadi di pasar Internasional.

3. Output dapat dipisahkan ke dalam komponen asing (*tradeable*) dan domestik (*non tradeable*).

4. Eksternalitas positif dan negatif dianggap saling meniadakan.

Policy Analysis Matrix (PAM) Penelitian ini menggunakan alat analisis PAM (*Policy Analysis Matrix*). Alat analisis PAM dikembangkan oleh Monke dan Person sejak tahun 1987. PAM merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau intervensi dalam berbagai aktivitas usahatani secara keseluruhan dan sistematis. Dalam penelitian ini PAM menyusun matrik yang berisi informasi biaya, pendapatan dan keuntungan privat serta sosial usaha Peternakan sapi potong dan sapi perah di Sulawesi Selatan. Informasi biaya, pendapatan dan keuntungan privat serta sosial usahatani memberikan indikator daya saing usahatani yaitu keunggulan komparatif dan kompetitif. Selain itu kebijakan pemerintah terhadap usaha peternakan sapi potong dan sapi perah di Sulawesi Selatan dapat dihitung melalui informasi yang disusun dalam matrik PAM.

Analisis PAM dapat digunakan pada usahatani dengan berbagai wilayah, tipe usahatani dan teknologi. Selain itu analisis PAM juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan dapat memperbaiki daya saing terhadap usahatani suatu komoditi yang dihasilkan melalui penciptaan efisiensi usaha dan pertumbuhan pendapatan. Model PAM dengan formulasi seperti pada tabel.

Tabel 5. Matriks Analisis Kebijakan (*Policy Matrix Analisis/PAM*)

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input <i>Tradeable</i>	Input <i>Non Tradeable</i>	
Harga Privat	A	B	C	D = A-B-C
Harga Sosial	E	F	G	H = E-F-G
Dampak Kebijakan/	I = A-E	J = B-F	K = C-G	L = D-H- I-J- K

Sumber: Scott Pearson, *et al.*, 2005:33

Keterangan :

Penerimaan usaha peternakan pada harga privat = A

Total biaya input *tradeable* usahatani pada harga privat = B

Total biaya input *non tradeable* usahatani pada harga privat = C

Penerimaan usaha Peternakan pada harga sosial = E

Total biaya input *tradeable* usahatani pada harga sosial = F

biaya input *non tradeable* usahatani pada harga sosial = G

Keuntungan privat = D

Keuntungan sosial = H Transfer output (OT) = I

Transfer input (IT) = J

Transfer faktor (TF) = K

Transfer bersih (NT)= L

Baris pertama dari matrik PAM adalah perhitungan dengan harga pasar(privat), yaitu harga yang secara aktual diterima dan dibayarkan petani.

Baris kedua merupakan penghitungan yang didasarkan pada harga sosial, yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial yang sesungguhnya bagi unsur biaya maupun hasil. Harga sosial merupakan harga tanpa kebijakan pemerintah dan kegagalan pasar. Baris ketiga merupakan selisih perhitungan dari harga privat dengan harga sosial sebagai dampak dari kebijakan. Tabel PAM dapat menghasilkan indikator profitabilitas, daya saing dan dampak kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas yang dianalisis adalah keuntungan privat dan keuntungan sosial. Indikator daya saing usahatani yang dianalisis adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Indikator kebijakan pemerintah yang diterima usahatani dapat dianalisis melalui Indikator kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan input – output dapat dihitung melalui informasi yang disusun dalam matrik PAM. Indikator profitabilitas, daya saing dan dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas antara lain:

1) Profitabilitas dan Daya Saing

Profitabilitas usahatani dilihat dari keuntungan privat dan keuntungan sosial. Daya paing usahatani dapat dilihat melalui keunggulan kompetitif dan komparatifnya.

A. Keuntungan privat dan keunggulan kompetitif didasarkan pada biaya dan pendapatan privat dalam perekonomian aktual. Keunggulan Kompetitif dapat dihitung melalui keuntungan privat dan Indikator *Private Cost Ratio*(PCR).

1. Keuntungan privat merupakan keuntungan yang sebenarnya diperoleh petani. Keuntungan privat dihitung berdasarkan harga privat. Keuntungan privat dalam tabel PAM disimbolkan dengan D. Indikatornya apabila D positif, berarti usahatani memperoleh keuntungan atau profit atas biaya normal dalam kondisi terdapat kebijakan pemerintah. Hal ini mempunyai implikasi bahwa komoditi tersebut mampu ekspansi, kecuali apabila sumberdaya terbatas atau adanya komoditi alternatif yang lebih menguntungkan. Apabila D negatif, usahatani tersebut tidak memperoleh profit atas biaya normal yang artinya bahwa usaha peternakan belum mampu ekspansi.

2. *Private Cost Ratio* (PCR) menunjukkan penggunaan sumber dayadomestik untuk menghasilkan nilai tambah usaha peternakan sapi potong. Indikator PCR didapat dari biaya privat input *non tradeable* usahatani dibandingkan pendapatan privat domestik dikurangi biaya input *tradeable* privat. PCR dapat dihitung dari notasi dalam tabel PAM = $C/(A-B)$. Indikatornya adalah apabila $PCR < 1$, usaha peternakan yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif $PCR > 1$, sistem input *tradeable* yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif.

B. Keuntungan sosial dan keunggulan komparatif didasarkan pada biaya dan pendapatan sosial, oleh karena itu keuntungan sosial dan keunggulan kompetitif mencerminkan efisiensi usaha peternakan. Keuntungan sosial dan keunggulan komparatif dapat dihitung melalui

keuntungan sosial dan indikator *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR).

1. Keuntungan sosial merupakan keuntungan yang seharusnya diterima petani apabila tidak ada kebijakan pemerintah dan kegagalan pasar. Keuntungan sosial pada tabel PAM disimbolkan dengan H. Indikatornya adalah apabila H positif, usaha peternakan tetap menguntungkan meski tidak ada kebijakan pemerintah. Apabila H negatif, berarti usahatani tidak menguntungkan dan tidak mampu bersaing tanpa kebijakan pemerintah.
2. Indikator yang menggambarkan rasio penggunaan faktor domestik yaitu *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR) dilihat dari nilai *Domestic Resource Cost* (DRC) yang dihitung dari identitas $G/(E-F)$ pada tabel PAM. Indikatornya apabila $DRC < 1$, usaha peternakan mempunyai keunggulan komparatif. Apabila $DRC > 1$, usaha peternakan tidak mempunyai keunggulan komparatif.

Rumus Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif

1. Keunggulan Komparatif

Pada keunggulan komparatif dapat menggunakan indikator Domestic resources cost ratio (DRCR).

$$DRC = \frac{\text{Biaya Input Non Treadable Sosial}}{\text{Pendapatan Sosial} - \text{Biaya Input Treadable Sosial}}$$

2. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif dapat di analisis dengan menggunakan indikator private cost ratio (PCR).

$$PCR = \frac{\text{Biaya Input Non Treadable Private}}{\text{Pendapatan Privat} - \text{Biaya Input Treadable Private}}$$

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha peternakan sapi potong dan sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan input – output.

A. Kebijakan Output dapat dilihat dari indikator Output Transfer (OT) dan

Nominal Protection Coefficient On Output (NPCO). Kedua kebijakan output ini berasal dari notasi penerimaan privat dan sosial (A & E) pada tabel PAM. Kebijakan Output terdiri dari :

1. Output Transfer dihitung dari selisih penerimaan privat dan penerimaan sosial (OT=A-E). Indikatornya apabila OT positif, menunjukkan terdapat transfer kepada usaha peternakan sehingga surplus usahatani meningkat. Sebaliknya OT negatif, adanya transfer kepada konsumen sehingga surplus konsumen meningkat.
2. *Nominal Protection Coefficient On Output* (NPCO) dihitung dari perbandingan identitas penerimaan privat dengan penerimaan sosial (A/E) pada tabel PAM. Indikatornya apabila NPCO>1, kebijakan telah mampu memproteksi usaha peternakan atau produsen komoditas. Apabila NPCO<1 kebijakan belum mampu memproteksi usahatani atau produsen komoditas.

B. Kebijakan Input terdiri dari kebijakan *Input Transfer* (IT), *Nominal Protection Coefficient on Tradeable Input* (NPCI) & *Transfer Factor* (TF).

1. Input transfer (IT) dihitung dari selisih notasi biaya input privat *tradeable* dan notasi biaya input sosial *tradeable* (B-F). Indikatornya apabila IT positif, menunjukkan terdapat transfer dari petani ke produsen input *tradeable*. Apabila IT negatif menunjukkan terdapat transfer dari produsen input *tradeable* kepada petani.
2. *Protection Coefficient on Tradeable Input* (NPCI) dihitung dari perbandingan notasi biaya input privat *tradeable* dan notasi biaya input sosial *tradeable* (B/F). Indikatornya apabila NPCI < 1, berarti kebijakan bersifat protektif terhadap usaha peternakan yaitu konsumen input *tradeable* berupa subsidi terhadap input *tradeable*. Apabila NPCI > 1, kebijakan tidak protektif terhadap usahatani atau tidak ada kebijakan subsidi terhadap input *tradeable*.
3. Transfer faktor (TF) dihitung dari selisih notasi biaya input *non tradeable* privat dan input *non tradeable* sosial pada tabel PAM (C-G). Indikatornya apabila TF positif, berarti terdapat transfer dari petani produsen kepada produsen input *non tradeable* begitu pula sebaliknya. Transfer faktor juga dapat terjadi karena kegagalan pasar pada input *non tradeable* dan karena *social opportunity cost of land*

C. Kebijakan Input-output terdiri dari kebijakan *Effective Protection Coefficient* (EPC), *Net Transfer*, *Profitability Coefficient* dan *Subsidi Ratio to Producer*.

1. *Effective Protection Coefficient* (EPC) dihitung dari notasi $(A-B)/(E-F)$ pada tabel PAM. Indikatornya apabila $EPC > 1$, gabungan atau keseluruhan kebijakan telah mampu memproteksi usaha peternakan. Apabila $EPC < 1$, gabungan atau keseluruhan kebijakan belum mampu memproteksi usahatani.
2. *Net transfer* (NT) dihitung dari selisih antara identitas keuntungan privat dengan keuntungan sosial (D-H). Indikatornya apabila NT positif, menunjukkan tambahan surplus usahatani secara keseluruhan. Apabila NT negatif, menunjukkan berkurangnya surplus usaha peternakan secara keseluruhan.
3. *Profitability Coefficient* (PC) dihitung dari perbandingan antar identitas keuntungan privat dengan keuntungan sosial (D/H). Indikatornya apabila $PC > 1$, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah telah mampu memberikan proteksi kepada usahatani. Apabila $PC < 1$, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah belum mampu memberikan proteksi kepada usaha peternakan.
4. *Subsidi Ratio to Producer* (SRP) dihitung dari perbandingan identitas keuntungan divergensi dibanding dengan penerimaan sosial (L/E). $SRP < 0$, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya. Timbangan untuk berproduksi (*opportunity cost*). $SRP = 0$, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku tidak menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari imbalan untuk berproduksi, sedangkan jika $SRP > 0$, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan

usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbalan untuk memproduksi.

2.8. Kerangka Pikir

Komoditas peternakan merupakan komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Begitupula daging sapi dan susu perah. Indonesia hingga kini masih mengimpor komoditas daging sapi dan susu perah. Adanya komoditas peternakan daging sapi dan susu perah impor dan domestik di pasar yang sama, menyebabkan komoditas saling bersaing agar dapat bertahan dalam pasar dan diminati konsumen. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini.



Daya Saing Dan Kebijakan Usaha
Peternakan Sapi

*Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Daya Saing Dan Kebijakan Usaha
Peternakan Sapi*

2.9. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya". Dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis yang dikemukakan nantinya bukanlah suatu jawaban yang benar secara mutlak, tetapi dipakai sebagai jalan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga bahwa keunggulan kompetitif dan komparatif usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang baik
2. Diduga bahwa pengaruh kebijakan sudah dapat mempertahankan usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan memilih lokasi penelitian ingin mengetahui seberapa besar daya saing peternakan yang ada di Sulawesi Selatan. Penelitian ini yang di laksanakan pada bulan Mei 2019. Penelitian ini untuk menganalisis daya saing usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian analisis daya saing usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Jenis Data

Data yang di gunakan dalam penelitian analisis daya saing usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah data sekunder data sekunder adalah data yang di ambil tidak secara langsung dari petani .

2. Sumber Data

Sumber data dalam peneltian penelitian analisis daya saing usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan dari Badan Pusat Statistik kementerian peternakan Nasional dan jurnal harga peternakan sapi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian analisis daya saing usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan Data diperoleh

dengan mengumpulkan data produksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) data juga di ambil dari kementerian pertanian, Kementrian peternakan, Kementerian Perdagangan dan sumber data dari jurna biaya usaha peternakan sapi.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode PAM dan Analisis Kebijakan di mana dalam metode ini akan menjelaskan tentang keunggulan daya saing usaha peternakan sapi di Sulawesi Selatan dan pengaruh kebijakannya.

3.5. Defenisi Oprasional Variable

Variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti dalam penelitian ini variabel-variabel menjadi objek penelitian antara lain (Acmahti, 2003).

Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditi untuk bersaing di pasar luar negeri atau kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar dalam negeri dan bersaing dengan komoditas dari luar negeri. Jika suatu produk mempunyai daya saing maka produk banyak diminati oleh banyak konsumen. Simanjuntak menyatakan bahwa daya saing adalah kemampuan produsen untuk memproduksi suatu komoditi dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga – harga yang terjadi di pasar internasional kegiatan produksi tersebut menguntungkan (Simanjuntak, 1992).

Kompetitif atau keunggulan bersaing (competitive advantage) adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu

perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama.

Keunggulan komparatif merupakan konsep yang diterapkan suatu negara untuk membandingkan beragam aktivitas produksi dan perdagangan di dalam negeri terhadap perdagangan dunia. Definisi tersebut menerangkan bahwa biaya produksi dinyatakan dalam nilai sosial dan harga komoditas diukur pada tingkat harga di pelabuhan yang berarti juga berupa harga bayangan. Dengan demikian, analisis keunggulan komparatif adalah analisis sosial dan bukan analisis privat. Analisis biaya faktor produksi dalam keunggulan komparatif merupakan analisis biaya ekonomi (*social cost*). Begitupula dalam penerimaan (output) yaitu penerimaan sosial. Oleh karena itu baik harga input maupun harga output tidak dihitung menggunakan komponen subsidi, pajak dan tarif yang mungkin terkandung dalam harga aktual di pasar. Berdasarkan teori tersebut pertimbangan efisiensi usahatani sangat menentukan keunggulan komparatif. Teori ini mendasari perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia terutama komoditas daging sapi yang hingga saat ini masih melakukan impor. (Nazir, 2005).

Harga privat (harga pasar) merupakan harga yang secara aktual dikeluarkan dan diterima oleh petani. Sedangkan harga sosial (harga efisiensi) merupakan harga yang seharusnya dibayar oleh petani apabila tidak ada kebijakan pemerintah pada masing – masing input dan output. Harga sosial untuk input maupun output tradeable merupakan harga internasional untuk barang yang sejenis harga impor untuk komoditas impor, harga ekspor untuk komoditas ekspor. Untuk itu harga internasional ditentukan melalui paritas

impor/ekspor komoditas. Begitu pula dengan biaya input *tradeable* yang dihitung menggunakan biaya sosial apabila mengimpor/mengekspor input *tradeable* yang bersangkutan..

Harga sosial (harga efisiensi) faktor domestik (lahan, tenaga kerja, dan modal) juga diestimasi dengan menggunakan *social opportunity cost*. Namun karena faktor domestik tidak diperdagangkan secara internasional, sehingga tidak memiliki harga internasional, maka *social opportunity cost* nya diestimasi melalui pengamatan pada wilayah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa pendapatan yang hilang karena faktor domestik digunakan untuk memproduksi komoditas tersebut dibandingkan dengan apabila digunakan untuk komoditas alternatif terbaiknya.

Input *tradeable* merupakan input yang diperdagangkan secara internasional seperti biaya dedak dan ampas tahu Input non *tradeable* merupakan input yang tidak diperdagangkan secara Internasional seperti biaya tenaga kerja.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis

Sulawesi Selatan terletak di jazirah selatan Pulau Sulawesi. Provinsi yang beribukota di Makassar ini secara administratif, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone dan di sebelah selatan dengan Laut Flores. Pada peta Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0 derajat 12'-8 derajat Lintang Selatan dan 116 derajat 48'-122 derajat 36' Bujur Timur. Sulawesi Selatan secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis, karena berada pada persimpangan jalur lalu lintas penumpang, perdagangan barang dan jasa dari kawasan barat Indonesia (KBI) ke kawasan timur Indonesia (KTI). Oleh karena itu, kawasan ini seringkali juga disebut pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 ini mempunyai luas kurang lebih 46.717,48 km persegi atau 4.1% dari total wilayah Indonesia. Sebelumnya, beberapa kabupaten dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, dan Majene dikembangkan/dimekarkan menjadi provinsi baru, Provinsi Sulawesi Barat karena ditunjang potensi sumber daya alamnya.

4.2. Kondisi Demografis

Sampai dengan Mei 2010, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 8.032.551 jiwa dengan pembagian 3.921.543 orang laki-laki dan 4.111.008 orang perempuan. Pada tahun 2013, penduduk di Sulawesi Selatan sudah mencapai 8.342.047 jiwa.

Salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah Mappalili. Mappalili (Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata palili yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya. Mappalili atau Appalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dari Kabupaten Pangkep terutama Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah diselenggarakan sejak beberapa tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai menanam padi. Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan ditanam, disalipuri (Bugis) atau dilebbu (Makassar) atau disimpan dari gangguan yang biasanya mengurangi produksi.

Mayoritas beragama Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja , Kabupaten Toraja Utara dan sebagian wilayah di Kabupaten Luwu Utara , Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu beragama Kristen Protestan.

Bahasa yang umum digunakan adalah:

- Bahasa Makassar adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah Makassar dan Sekitarnya. Tersebar di Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jenepono, Bantaeng, sebagian Bulukumba sebagian Maros dan sebagian Pangkep.
- Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah Bone sampai ke Kabupaten Pinrang, Sinjai, Barru, Pangkep, Maros, Kota Pare Pare, Sidrap, Wajo, Soppeng Sampai di daerah Enrekang, bahasa ini adalah bahasa yang paling banyak di pakai oleh masyarakat Sulawesi Selatan.
- Bahasa Pettae adalah salah satu bahasa yang dipertuturkan di daerah Tana Luwu, mulai dari Siwa, Kabupaten Wajo, Enrekang Duri, sampai ke Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.
- Bahasa Toraja adalah salah satu rumpun bahasa yang dipertuturkan di daerah Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan sekitarnya.
- Bahasa Mandar adalah bahasa suku Mandar, yang tinggal di provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Utara. Di samping di wilayah-wilayah inti suku ini, mereka juga tersebar di pesisir Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- Bahasa Massenrempulu adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia di Sulawesi Selatan. Bahasa ini memiliki tiga kelompok dialek di Kabupaten Enrekang, yaitu dialek Duri, Endekang dan Maiwa. Kelompok dialek bahasa Duri memiliki kedekatan dengan bahasa Toraja dan bahasa Tae' Luwu. Penuturnya tersebar di wilayah utara Gunung Bampuang,

Kabupaten Enrekang sampai wilayah perbatasan Tana Toraja. Kelompok dialek bahasa Endekang mempunyai penutur di ibu kota Kabupaten Enrekang dan beberapa kecamatan sekitarnya. Sedangkan penutur kelompok dialek bahasa Maiwa terdapat di Kecamatan Maiwa dan di Kecamatan Bungin (Maiwa Atas).

- Bahasa Konjo terbagi menjadi dua yaitu Bahasa Konjo pesisir dan Bahasa Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir tinggal di kawasan pesisir Bulukumba dan Sekitarnya, di sudut tenggara bagian selatan pulau Sulawesi sedangkan Konjo pegunungan tinggal di kawasan tenggara gunung Bawakaraeng.
- Bahasa Selayar adalah bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang bermukim diujung selatan provinsi ini khususnya Kab. Kep. Selayar.

4.3. Peternakan Sulsel

Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki pengembangan usaha peternakan sapi yang cukup baik di karenakan banyaknya penduduk Sulawesi Selatan yang bergerak dalam agribisnis peternakan sapi populasi dan produksi sapi pada tahun 2018 sekitar 1.366.655 populasi ternak sapi di Sulawesi Selatan sedangkan produksi peternakan sapi 20.671 Ton pada tahun 2018 (BPS ,2018). Daerah yang memproduksi sapi di Sulsel adalah Kepulauan Selayar,Bulukumba,Bantaeng,Jeneponto,Takalar,Gowa,Sinjai,Maros,Pangkep, Barru,Bone,Soppeng,Wajo,Sidrap,Pinrang, Enrekang, Luwu, Tanah Toraja,Luwu Timur,Luwu Utara,Makassar,Palopo,Pare-Pare Dan Toraja Utara (BPS, 2015).

VI. HASIL PEMBAHASAN

5.1. Daya Saing Usaha Peternakan Sapi

Hasil Analisis Daya Saing Usaha Peternakan Sapi Potong di Provinsi Sulawesi Selatan akan membaha tentang analisi PAM ,keunggulan Komparatif dan keunggulan kompetitif terhadap usaha peternakan sapi dapat di lihat di bawah ini:

5.1.1. Analisis PAM Usaha Peternakan Sapi Potong

Hasil dari analisis daya saing usaha peternakan sapi Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan teknik analisis PAM Matriks Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Matrix/PAM*) digunakan untuk menganalisis keadaan ekonomi dari pemilik ditinjau dari sudut usaha swasta (*private profit*) dan sekaligus memberi ukuran tingkat efisiensi ekonomi usaha atau keuntungan sosial (*social profit*) dapat di lihat di tabel bawah ini:

Tabel . 5 . 1 . Analisis PAM Usaha Peternakan Sapi Potong

Keterangan	Penerimaan	BIAYA		Keuntungan
		Input Tradeable	Input Non Tradeable	
Harga Privat	A= 2,475,088,399	B= 1,161,204.09	C= 4,252,397	D= 2,469,674,798
Harga Sosial	E=2,062,270,975	F= 576,628.01	G=4,252,397	H= 2,057,441,950
Dampak Kebijakan/	I= 412,817,424	J=584,576.08	K =0	L=-1,169,152.08

Sumber: Data di olah tahun 2019

Pembahasan:

Metode analisis PAM ini memperlihatkan tentang penerimaan harga privat, harga sosial, Input tradeable, input non tradeable, keuntungan harga privat dan harga sosial dan pada analisis PAM juga memperlihatkan tentang dampak kebijakan usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan.

5.1.2. Analisis Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Usaha Peternakan Sapi Potong Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Keunggulan Komparatif dan keunggulan kompetitif Usaha Peternakan Sapi Potong Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat di penjelasan analisis keunggulan di bawah ini:

A. Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif adalah analisis sosial dan bukan analisis privat. Analisis biaya faktor produksi dalam keunggulan komparatif merupakan analisis biaya ekonomi (*social cost*). Begitupula dalam penerimaan (output) yaitu penerimaan sosial. Oleh karena itu baik harga input maupun harga output tidak dihitung menggunakan komponen subsidi, pajak dan tarif yang mungkin terkandung dalam harga aktual di pasar. Berdasarkan teori tersebut pertimbangan efisiensi usaha peternakan sangat menentukan keunggulan komparatif. Teori ini mendasari perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia terutama komoditas daging sapi yang hingga saat ini masih melakukan impor.

Rumus Keunggulan Komparatif :

Keunggulan Komparatif

Pada keunggulan komparatif dapat menggunakan indikator Domestic resources cost ratio (DRCR).

$$DRC = \frac{\text{Biaya Input Non Treadable Sosial}}{\text{Pendapatan Sosial} - \text{Biaya Input Treadable Sosial}}$$

$$DRC = \frac{\text{Rp. 4.252.397}}{2.469.656.789 - 576.628,01}$$

DRC= 0.0172225947

Pembahasan:

Indikator yang menggambarkan rasio penggunaan faktor domestik yaitu *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR) dilihat dari nilai *Domestic Resource Cost* (DRC) yang dihitung dari identitas G/(E-F) pada tabel PAM. Indikatornya apabila $DRC < 1$, usaha peternakan sapi potong mempunyai keunggulan komparatif. Apabila $DRC > 1$, usaha peternakan tidak mempunyai keunggulan komparatif hasil yang di dapatkan adalah 0.0172225947 itu artinya usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan efisiensi biaya produksi.

B. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif menjelaskan kondisi daya saing pembangunan suatu negara yang kompetitif. Menurut teori ini, karakteristik perusahaan atau industri maju berskala internasional harus memiliki produk, proses dan keahlian.

Rumus keunggulan kompetitif

Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif dapat di analisis dengan menggunakan indikator private cost ratio (PCR).

$$PCR = \frac{\text{Biaya Input Non Treadable Private}}{\text{Pendapatan privat} - \text{Biaya Input Treadable Private}}$$

$$PCR = \frac{4.252.397}{2.057.441.950 - 1.161.204,09}$$

PCR= 0.0020680041

Pembahasan:

Private Cost Ratio (PCR) menunjukkan penggunaan sumber daya domestik untuk menghasilkan nilai tambah usaha peternakan sapi potong. Indikator PCR didapat dari biaya privat input non tradeable usaha peternakan dibandingkan pendapatan privat domestik dikurangi biaya input tradeable privat. PCR dapat dihitung dari notasi dalam tabel PAM = C/(A-B). Indikatornya adalah apabila PCR<1, usaha peternakan yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif PCR>1, sistem input tradeable yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif jadi hasil dari keunggulan kompetitif usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0.0020680041 jadi dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan sapi potong ini memiliki keunggulan kompetisi dalam daya saing produksi dan proses keahlian.

Tabel. 5. 2. Daya Saing Usaha Peternakan Sapi Potong Sulawesi Selatan

No	Daya Saing	%	Simbol
1	Kompetitif	0.0020680041	<
2	Komperatif	0.0172225947	<

Sumber : Data Diolah 2019

5.1.3. Analisis PAM Usaha Peternakan Sapi perah

Hasil dari analisis daya saing usaha peternakan sapi Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan teknik analisis PAM Matriks Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Matrix/PAM*) digunakan untuk menganalisis keadaan ekonomi dari pemilik ditinjau dari sudut usaha swasta (*private profit*) dan

sekaligus memberi ukuran tingkat efisiensi ekonomi usaha atau keuntungan sosial (*social profit*) dapat di lihat di tabel bawah ini:

Tabel.5.5. Analisis PAM Usaha Peternakan Sapi Perah

Keterangan	Penerimaan	BIAYA		Keuntungan
		Input Tradeable	Input Non Tradeable	
Harga Privat	A= 27,748,399	B= 1,161,204.09	C= 4,252,397	D= 22,334,798
Harga Sosial	E=20,055,974	F= 576,628.01	G=4,252,397	H= 15,226,949
Dampak				
Kebijakan/	I = 7,692,425	J =584,576.08	K =0	L =- 1,169,154

Sumber: Data diolah 2019

Pembahasan:

Metode analisis PAM ini memperlihatkan tentang penerimaan harga privat , harga sosial , Input tradeable , input non tradeable ,keuntungan harag privat dan harga sosial dan pada analisis PAM juga memperlihatkan tentang dampak kebijakan usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan.

5.1.4. Analisis Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Usaha Peternakan Sapi Perah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Keunggulan Komparatif dan keunggulan kompetitif Usaha Peternakan Sapi Perah Provinsi Sulawesi Selatan dapat di lihat di penjelasan analisis keunggulan di bawah ini:

A. Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif adalah analisis sosial dan bukan analisis privat. Analisis biaya faktor produksi dalam keunggulan komparatif merupakan analisis biaya ekonomi (*social cost*). Begitupula dalam penerimaan (output) yaitu penerimaan sosial. Oleh karena itu baik harga input maupun harga output tidak dihitung menggunakan komponen subsidi, pajak dan tarif yang mungkin terkandung dalam harga aktual di pasar. Berdasarkan teori tersebut pertimbangan efisiensi usaha peternakan sangat menentukan keunggulan komparatif. Teori ini mendasari perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia terutama komoditas daging sapi yang hingga saat ini masih melakukan impor.

Rumus Keunggulan Komparatif :

Keunggulan Komparatif

Pada keunggulan komparatif dapat menggunakan indikator Domestic resources cost rasio (DRCR).

$$DRC = \frac{\text{Biaya Input Non Treadable Sosial}}{\text{Pendapatan Sosial} - \text{Biaya Input Treadable Sosial}}$$

$$DRC = \frac{4.252.397}{14,624,373.99 - \text{Rp.}576,628.01}$$

$$DRC = 0.3027102715$$

Pembahasan:

Indikator yang menggambarkan rasio penggunaan faktor domestik yaitu *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR) dilihat dari nilai *Domestic Resource Cost* (DRC) yang dihitung dari identitas $G/(E-F)$ pada tabel PAM. Indikatornya apabila $DRC < 1$, usaha peternakan sapi potong mempunyai keunggulan komparatif. Apabila $DRC > 1$, usaha peternakan tidak mempunyai keunggulan

komparatif hasil yang di dapatkan adalah 0.3027102715itu artinya usaha peternakan sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan efisiensi biaya produksi.

B. Keunggulan Kompetitif

keunggulan kompetitif menjelaskan kondisi daya saing pembangunan suatu negara yang kompetitif. Menurut teori ini, karakteristik perusahaan atau industri maju berskala internasional harus memiliki produk, proses dan keahlian.

Rumus keunggulan kompetitif

Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif dapat di analisis dengan menggunakan indikator private cost ratio (PCR).

$$\text{PCR} = \frac{\text{Biaya Input Non Treadable Private}}{\text{Pendapatan privat} - \text{Biaya Input Treadable Private}}$$

$$\text{PCR} = \frac{4.252.397}{15,226,949 - \text{Rp. } 1,161,204.09}$$

$$\text{PCR} = 0.3023229148$$

Pembahasan:

Private Cost Ratio (PCR) menunjukkan penggunaan sumber daya domestik untuk menghasilkan nilai tambah usaha peternakan sapi potong. Indikator PCR didapat dari biaya privat input non tradeable usaha peternakan dibandingkan pendapatan privat domestik dikurangi biaya input tradeable privat. PCR dapat dihitung dari notasi dalam tabel PAM = C/(A-B). Indikatornya adalah apabila PCR<1, usaha peternakan yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif PCR>1, sistem input tradeable yang diteliti tidak memiliki keunggulan kompetitif jadi hasil dari keunggulan kompetitif usaha

peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0.3023229148 jadi usaha peternakan sapi perah ini memiliki keunggulan kompetitif dalam daya saing produknya dan proses keahlian.

Tabel.5.4. Daya saing usaha peternakan sapi perah

No	Daya Saing	%	Simbol
1	Kompetitif	0.3023229148	<
2	Komperatif	0.3027102715	<

Sumber : Data diolah 2019

5.2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Peternakan Sapi

Analisis kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan input – output.

5.2.1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Peternakan Sapi Potong

Analisis kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan input – output.

A. Kebijakan Output dapat dilihat dari indikator Output Transfer (OT) dan *Nominal Protection Coefficient On Output* (NPCO). Kedua kebijakan output ini berasal dari notasi penerimaan privat dan sosial (A & E) pada tabel PAM. Kebijakan Output terdiri dari :

1. Output Transfer dihitung dari selisih penerimaan privat dan penerimaan sosial ($OT=A-E$). Indikatornya apabila OT positif, menunjukkan terdapat transfer kepada usaha peternakan sehingga surplus (keuangan) usaha

peternakan meningkat. Sebaliknya OT negatif, adanya transfer kepada konsumen sehingga surplus konsumen meningkat.

Rumus:

OT= Penerimaan Privat – Penerimaan Sosial

OT= Rp. 2.475.088.399– Rp. 2.062.270.975

OT= Rp. 412.817.424

Pembahasan

Hasil dari indikator Output transfer yang di miliki oleh usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan adalah positif yaitu senilai Rp. 412.817.424 hal ini menunjukkan bahwasanya surplus usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keuntungan yang baik.

2. *Nominal Protection Coefficient On Output* (NPCO) dihitung dari perbandingan identitas penerimaan privat dengan penerimaan sosial (A/E) pada tabel PAM. Indikatornya apabila NPCO > 1, kebijakan telah mampu memproteksi melindungi usaha peternakan atau produsen komoditas. Apabila NPCO < 1 kebijakan belum mampu memproteksi usaha atau produsen komoditas.

$$\text{NPCO} = \frac{\text{penerimaan Privat}}{\text{penerimaan Sosial}}$$

$$\text{NPCO} = \frac{2.475.088.399}{2.062.270.975}$$

$$\text{NPCO} = 1.2001761306$$

Pembahasan

Hasil dari *Nominal Protection Coefficient On Output* yang di miliki oleh usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.2001761306 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah dapat memberi perlindungan usaha peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga masi dapat bertahan.

B. Kebijakan Input terdiri dari kebijakan *Input Transfer* (IT), *Nominal Protection Coeffisien on Tradeable Input* (NPCI) & *Transfer Facktor* (TF).

1. Input transfer (IT) dihitung dari selisih notasi biaya input privat *tradeable* dan biaya input sosial *tradeable* (B–F). Indikatornya apabila IT positif, menunjukkan terdapat transfer dari petani ke produsen. Apabila IT negatif menunjukkan terdapat transfer dari produsen input *tradeable* kepada petani.

Rumus:

$IT = \text{Biaya Input Privat Tradeable} - \text{Biaya Input Sosial Tradeable}$

$IT = \text{Rp. } 1.161.204,09 - \text{Rp. } 576.628,01$

$IT = \text{Rp. } 584.576,08$

Pembahasan

Hasil dari input transfer usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawe Selatan adalah Rp. 584,576.08 hal ini menunjukkan terdapat transer biaya dari petani ke produsen.

2. *Protection Coeffisien on Tradeable Input* (NPCI) dihitung dari perbandingan notasi biaya input privat *tradeable* dan notasi biaya input sosial *tradeable* (B/F). Indikatornya apabila $NPCI < 1$, berarti

kebijakan bersifat protektif(perlindungan)terhadap usaha peternakan yaitu berupa subsidi terhadap input *tradeable*. Apabila $NPCI > 1$,kebijakan tidak protektif terhadap usaha peternakan atau tidak ada kebijakan subsidi terhadap input *tradeable*.

Rumus:

$$NPCI = \frac{\text{Biaya Input Privat Tradeable}}{\text{Biaya Input Sosial Tradeable}}$$

$$NPCI = \frac{1.161.204,09}{576.628,01}$$

$$NPCI=2.0137837043$$

Pembahasan:

Hasil dari NPCI usaha peternakan sapi potong di provinsi Sulawesi Selatan adalah %.2.0137837043 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah tidak memberi perlindungan biaya produksi terhadap usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Transfer faktor (TF) dihitung dari selisih notasi biaya input *nontradeable* privat dan input *non tradeable* sosial pada tabel PAM (C-G). Indikatornya apabila TF positif, berarti terdapat transfer dari petani produsen kepada produsen input *non tradeable* begitu pula sebaliknya. Transfer faktor juga dapat terjadi karena kegagalan pasar pada input *non tradeable* dan karena biaya sosial di tanggung oleh rakyat

Rumus:

$$TF = \text{Biaya Input Non Tradeable Privat} - \text{Input Non Tradeable Sosial}$$

$$TF = \text{Rp. } 4,252,397 - 4,252,397$$

$$TF = 0$$

Pembahasan

Hasil menunjukkan bahwasanya Transfer faktor usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kegagalan di karenakan biaya sosial di tanggung oleh masyarakat tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah.

C. Kebijakan Input-output terdiri dari kebijakan *Efective Protection Coefficient* (EPC), *Net Transfer*, *Profitability Coefficient* dan *Subsidi Ratio to Producer*.

1. *Efective Protection Coefficient* (EPC) dihitung dari notasi (A-B)/(E-F) pada tabel PAM. Indikatornya apabila $EPC > 1$, gabungan atau keseluruhan kebijakan telah mampu memproteksi usaha peternakan. Apabila $EPC < 1$, gabungan atau keseluruhan kebijakan belum mampu memproteksi usaha peternakan.

Rumus :

$$EPC = \frac{(\text{Penerimaan pada harga privat} - \text{biaya input tradeable harga privat})}{(\text{Penerimaan harga sosial} - \text{biaya input harga sosial})}$$

$$EPC = \frac{(2,475,088,399 - 1,161,204.09)}{(2,062,270,975 - 576,628.01)}$$

$$EPC = \frac{2,473,927,175}{2,061,694,347}$$

$$EPC = 1.1999485659$$

Pembahasan:

Hasil dari *Efective Protection Coefficient* usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan adalah %1.1999485659 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah telah mampu memberikan

perlindungan terhadap usaha peternakan sapi potong yang ada di Sulawesi Selatan.

2. *Net transfer* (NT) dihitung dari selisih antara identitas keuntunganprivat dengan keuntungan sosial (D-H). Indikatornya apabila NT positif, menunjukkan tambahan surplus usaha peternakan secara keseluruhan. Apabila NT negatif, menunjukkan berkurangnya surplus usaha peternakan secara keseluruhan.

Rumus :

NT= Keuntungan Privat – Keuntungan Sosial

NT=2.469.674.798–2.057.441.950

NT=Rp.412.232.848

Pembahasan:

Hasil dari net transfer usaha peternakan sapi Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp.412,232,848 hal ini menunjukkan bahwasanya usaha peternakan sapi potong menunjukkan tambahan surplus atau keuangan usaha peternakan secara keseluruhan.

3. *Profitability Coefficient* (PC) dihitung dari perbandingan antar identitas keuntungan privat dengan keuntungan sosial (D/H). Indikatornya apabila $PC > 1$, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah telah mampu memberikan proteksi kepada usaha peternakan. Apabila $PC < 1$, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah belum mampu memberikan proteksi kepada usaha peternakan

Rumus :

$$PC = \frac{\text{Keuntungan privat}}{\text{keuntungan sosial}}$$

$$PC = \frac{2.469.674.798}{2.057.441.9501}$$

$$PC=1.2003618367$$

Pembahasan:

Hasil dari *Profitability Coefficient* usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.2003618367 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah telah mampu memberikan perlindungan terhadap usaha peternakan sapi potong.

4. *Subsidi Ratio to Producer* (SRP) dihitung dari perbandingan identitas keuntungan divergensi dibanding dengan penerimaan sosial (L/E). SRP<0, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usaha mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya. Timbangan untuk berproduksi (*opportunity cost*). SRP=0, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku tidak menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar untuk berproduksi, sedangkan jika SRP>0, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usaha mengeluarkan biaya produksi lebih kecil .

$$SRP = \frac{\text{Transfer bersih}}{\text{Penerimaan sosial}}$$

$$SRP = \frac{1.169.152,08}{2.062.270.975}$$

$$SRP= 0.0005669246$$

Pembahasan:

Hasil dari *Subsidi Ratio to Producer* usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0.0005669246 hal ini menunjukkan

bahwasanya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih kecil.

Tabel.5.5. Analisis Kebijakan Usaha Peternakan Sapi Potong

No	Analisis Kebijakan	%/RP	Simbol
1	OT	Rp. 412.817.424	+
2	NPCO	1.2%	>
3	IT	Rp. 584.576,08	+
4	NPCI	20137837043%	>
5	TF	0	=
6	EPC	11999485659%	>
7	NT	Rp.412.232.848	+
8	PC	1.20%	>
9	SRP	0.0005669246%	<

Sumber : Data Diolah 2019

5.2.2. Analisis Kebijakan Usaha Peternakan Sapi Perah Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis kebijakan pemerintah yang mempengaruhi usaha peternakan sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari kebijakan input, kebijakan output serta kebijakan input – output.

A. Kebijakan Output dapat dilihat dari indikator Output Transfer (OT) dan *Nominal Protection Coefficient On Output* (NPCO). Kedua kebijakan output ini berasal dari notasi penerimaan privat dan sosial (A & E) pada tabel PAM. Kebijakan Output terdiri dari :

1. Output Transfer dihitung dari selisih penerimaan privat dan penerimaan sosial ($OT=A-E$). Indikatornya apabila OT positif, menunjukkan terdapat transfer kepada usaha peternakan sehingga surplus (keuangan) usaha

peternakan meningkat. Sebaliknya OT negatif, adanya transfer kepada konsumen sehingga surplus konsumen meningkat.

Rumus:

OT= Penerimaan Privat – Penerimaan Sosial

OT= 27.748.399 – 20.055.974

OT= Rp. 7.692.425

Pembahasan

Hasil dari indikator Output transfer yang di miliki oleh usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan adalah positif yaitu senilai Rp. 7.692.425 hal ini menunjukkan bahwasanya surplus usaha peternakan sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keuntungan yang baik.

2. *Nominal Protection Coefficient On Output* (NPCO) dihitung dari perbandingan identitas penerimaan privat dengan penerimaan sosial (A/E) pada tabel PAM. Indikatornya apabila $NPCO > 1$, kebijakan telah mampu memproteksi melindungi usaha peternakan atau produsen komoditas. Apabila $NPCO < 1$ kebijakan belum mampu memproteksi usaha atau produsen komoditas.

Rumus:

$$NPCO = \frac{\text{Penerimaan Privat}}{\text{Penerimaan Sosial}}$$

$$NPCO = \frac{27.748.399}{20.055.974}$$

NPCO=1.3835478147

Pembahasan

Hasil dari *Nominal Protection Coefficient On Output* yang di miliki oleh usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.3835478147 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah dapat memberi perlindungan usaha peternakan sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga masi dapat bertahan.

B. Kebijakan Input terdiri dari kebijakan *Input Transfer* (IT), *Nominal Protection Coeffisien on Tradeable Input* (NPCI) & *Transfer Facktor* (TF).

1. Input transfer (IT) dihitung dari selisih notasi biaya input privat *tradeable* dan biaya input sosial *tradeable* (B–F). Indikatornya apabila IT positif, menunjukkan terdapat transfer dari petani ke produsen. Apabila IT negatif menunjukkan terdapat transfer dari produsen input *tradeable* kepada petani.

Rumus:

$IT = \text{Biaya Input Privat Tradeable} - \text{Biaya Input Sosial Tradeable}$

$IT = 1.161.204,09 - \text{Rp.}576.628,01$

$IT = \text{Rp.}584.576,08$

Pembahasan

Hasil dari input transfer usaha peternakan sapi perah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp. 584,576.08 hal ini menunjukkan terdapat tranfer biaya dari petani ke produsen.

2. *Protection Coeffisien on Tradeable Input* (NPCI) dihitung dari perbandingan notasi biaya input privat *tradeable* dan notasi biaya input sosial *tradeable* (B/F). Indikatornya apabila $NPCI < 1$, berarti

kebijakan bersifat protektif(perlindungan)terhadap usaha peternakan yaitu berupa subsidi terhadap input *tradeable*. Apabila $NPCI > 1$,kebijakan tidak protektif terhadap usaha peternakan atau tidak ada kebijakan subsidi terhadap input *tradeable*.

Rumus:

$$NPCI = \frac{\text{Biaya Input Privat Tradeable}}{\text{Biaya Input Sosial Tradeable}}$$

$$NPCI = \frac{1.161.204,09}{576.628,01}$$

$$NPCI = 2.0137837043$$

Pembahasan:

Hasil dari NPCI usaha peternakan sapi potong di provinsi Sulawesi Selatan adalah 2.0137837043 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah tidak memberi perlindungan biaya produksi terhadap usaha peternakan sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Transfer faktor (TF) dihitung dari selisih notasi biaya input *nontradeable* privat dan input *non tradeable* sosial pada tabel PAM (C-G). Indikatornya apabila TF positif, berarti terdapat transfer dari petani produsen kepada produsen input *non tradeable* begitu pula sebaliknya. Transfer faktor juga dapat terjadi karena kegagalan pasar pada input *non tradeable* dan karena biaya sosial di tanggung oleh rakyat

Rumus:

$$TF = \text{Biaya Input Non Tradeable Privat} - \text{Input Non Tradeable Sosial}$$

$$TF = \text{Rp. } 4.252.397 - 4.252.397$$

$$TF = 0$$

Pembahasan

Hasil menunjukkan bahwasanya Transfer faktor usaha peternakan sapi perah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kegagalan di karenakan biaya sosial di tanggung oleh masyarakat tanpa ada bantuan dari pihak pemerintah.

C. Kebijakan Input-output terdiri dari kebijakan *Efective Protection Coefficient* (EPC), *Net Transfer*, *Profitability Coefficient* dan *Subsidi Ratio to Producer*.

1. *Efective Protection Coefficient* (EPC) dihitung dari notasi (A-B)/(E-F) pada tabel PAM. Indikatornya apabila $EPC > 1$, gabungan atau keseluruhan kebijakan telah mampu memproteksi usaha peternakan. Apabila $EPC < 1$, gabungan atau keseluruhan kebijakan belum mampu memproteksi usaha peternakan.

Rumus :

$$EPC = \frac{(\text{Penerimaan pada harga privat} - \text{biaya input tradeable harga privat})}{(\text{Penerimaan harga sosial} - \text{biaya input harga sosial})}$$

$$EPC = \frac{(27.748.399 - 1.161.204,09)}{(20.055.974 - 576.628,01)}$$

$$EPC = \frac{26.587.194,91}{19.479.345,99}$$

$$EPC = 1.3648915587$$

Pembahasan :

Hasil dari *Efective Protection Coefficient* usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.3648915587 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah telah mampu memberikan

perlindungan terhadap usaha peternakan sapi perah yang ada di Sulawesi Selatan.

2. *Net transfer* (NT) dihitung dari selisih antara identitas keuntunganprivat dengan keuntungan sosial (D-H). Indikatornya apabila NT positif, menunjukkan tambahan surplus usaha peternakan secara keseluruhan. Apabila NT negatif, menunjukkan berkurangnya surplus usaha peternakan secara keseluruhan.

Rumus :

NT= Keuntungan Privat – Keuntungan Sosial

NT=22.334.798- 15.226.949

NT=Rp 7.107.849

Pembahasan:

Hasil dari net transfer usaha peternakan sapi Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rp 7.107.849 hal ini menunjukkan bahwasanya usaha peternakan sapi perah menunjukkan tambahan surplus atau keuangan usaha peternakan secara keseluruhan.

3. *Profitability Coefficient* (PC) dihitung dari perbandingan antaraidentitas keuntungan privat dengan keuntungan sosial (D/H). Indikatornya apabila $PC > 1$, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah telah mampu memberikan proteksi kepada usaha peternakan. Apabila $PC < 1$, artinya secara keseluruhan kebijakan pemerintah belum mampu memberikan proteksi kepada usaha peternakan:

$$PC = \frac{\text{Keuntungan privat}}{\text{keuntungan sosial}}$$

$$PC = \frac{22.334.798}{15.226.949}$$

$$PC=1.4667940373$$

Pembahasan:

Hasil dari *Profitability Coefficient usaha peternakan sapi perah* Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.4667940373 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah telah mampu memberikan perlindungan terhadap usaha peternakan sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. *Subsidi Ratio to Producer (SRP)* dihitung dari perbandingan identitaskeuntungan divergensi dibanding dengan penerimaan sosial (L/E). $SRP < 0$, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya. Timbangan untuk berproduksi (*opportunity cost*). $SRP = 0$, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku tidak menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar untuk berproduksi, sedangkan jika $SRP > 0$, artinya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan usahatani mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbangan untuk berproduksi.

Rumus:

$$SRP = \frac{\text{Transfer bersih}}{\text{Penerimaan sosial}}$$

$$SRP = \frac{1.169.154}{20.055.974}$$

$$SRP= 0.058294551$$

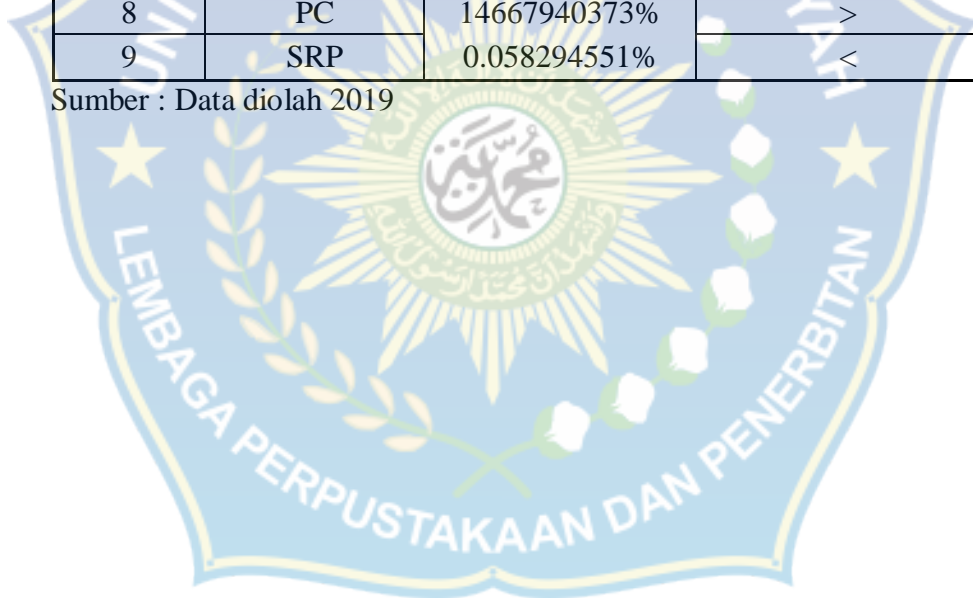
Pembahasan:

Hasil dari *Subsidi Ratio to Producer* usaha peternakan sapi perah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0.058294551 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah yang berlaku menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar.

Table.5.6. Analisis Kebijakan Usaha Peternakan Sapi Perah

No	Analisis Kebijakan	%/RP	Simbol
1	OT	Rp. 7.692.425	+
2	NPCO	13835478147%	>
3	IT	Rp.584.576,08	+
4	NPCI	20137837043%	>
5	TF	0	
6	EPC	1.36%	>
7	NT	Rp7.107.849	+
8	PC	14667940373%	>
9	SRP	0.058294551%	<

Sumber : Data diolah 2019



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dari penelitian usaha peternakan sapi di simpulkan sebagai berikut

1. Keunggulan Kompetitif dan Komperatif

A. Usaha peternakan sapi Potong

Kesimpulan dari keunggulan komperatif yang di dapatkan usaha peternakan sapi potong adalah 0.0172225947 itu artinya usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan efisiensi biaya produksi.

Kesimpulan dari keunggulan kompetitif usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0.0020680041 jadi dapat di simpulkan bahwa usaha peternakan sapi potong ini memiliki keunggulan kompetisi dalam daya saing produksi dan proses keahlian.

B. Usaha Peternakan Sapi Perah

Kesimpulan dari keunggulan komperatif yang di dapatkan adalah 0.3027102715 itu artinya usaha peternakan sapi perah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif dalam produksi dan efisiensi biaya produksi.

Kesimpulan dari keunggulan kompetitif usaha peternakan sapi potong Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0.3023229148 jadi usaha peternakan sapi perah ini memiliki keunggulan kompetitif dalam daya saing produknya dan proses keahlian.

2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah

A. Kebijakan Usaha Peternakan Sapi Potong

Kesimpulan dari *Nominal Protection Coefficient On Output* yang dimiliki oleh usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.2001761306 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah dapat memberi perlindungan usaha peternakan sapi

B. Kebijakan Usaha Peternakan Sapi Perah

Kesimpulan dari *Nominal Protection Coefficient On Output* yang dimiliki oleh usaha peternakan sapi potong di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.3835478147 hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah dapat memberi perlindungan usaha peternakan sapi

6.2. Saran

Saran yang akan saya berikan adalah saran yang berkaitan dengan judul penelitian saya analisis daya saing usaha peternakan sapi Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat di bawah ini.

1. Agar pemerintah lebih mendukung lagi usaha peternakan sapi di karenakan peluang bisnis di usaha ini sangat besar di mana permintaan pasar terhadap hasil dari usaha peternakan sapi .
2. Agar mahasiswa lebih mempelajari tentang begi mana cara budidaya yang baik dalam proses usaha peternakan sapi di karenakan peluang bisnis sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nurayati , 2015. Analisis Daya Saing Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap usaha tani padi.Skripsi Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang.
- Acmahti, 2003. Variabel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pristiwa .<https://id.wikipedia.org/wiki/Variabel>. Diakses 9 April 2019.
- Badan Pusat Statistik. Berbagai tahun. Produksi Sapi Potong Dan Perah Nasional : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. Berbagai tahun. Produksi Sapi Potong Dan Perah SULSEL : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik , 2009. Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian. http://repository.upi.edu/377/4/S_GEO_0905958_CHAPTER1.pdf. Diakses Tanggal 12/6/2019.
- Badan Pusat Statistik, 2002 . Pertanian Di Indonesia Penyediaan Lapangan Kerja .<https://www.bps.go.id/>. Diakses Tanggal 12/6/2019.
- [BKP] Badan Ketahanan Pangan. 2015. Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan. Jakarta.
- Bentara Online. 2009. Triliunan Rupiah Mengalir dari Kandang Ternak. <http://www.bentara-online.com>, 12/6/ 2019
- Cuevas, Roberto. (2004). Food Engi- neering, Quality and Competitiveness in Small FoodIndustry Systems with Emphasis on Latin America and The Caribbean. Rome: FAO.
- Ditjennak. 1990. Pembangunan Peternakan Wilayah Indonesia Bagian Timur: Bahan untuk Menteri Muda Pertanian. Ditjennak, Jakarta.
- David Ricardo, 2010. Kerjasama Perdagangan Antara Negara.<https://www.danaher.com/coc/id/our-world/international-trade.html>. Diakses 9 April 2019.
- Daryanto, 2009. Pertanian Dan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Pertanian.<http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/>. Diakses 9 April 2019.
- David Ricardo, 2010. Kerjasama Perdagangan Antara Negara.<https://www.danaher.com/coc/id/our-world/international-trade.html>. Diakses 9 April 2019.
- Elekes. (2002). Factors Determining EU-Co- mpetitiveness of the Hungarian Agriculture: Trade Policy Approach. Paper prepared for presentation at

- the Xth EAAE Congress 'Exploring Diversity in the European Agri - Food System', Zaragoza (Spain), 28-31 August.
- Fery. 2013. "Analisis Daya Saing Usahatani Kopi Robusta (Coffee Canephora) di Kabupaten Rejang Lebong". Tesis. Bengkulu: Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
- Hadi, 2002. Problem dan prospek pengembangan usaha pembibitan sapi potong di Indonesia. *Jurnal Litbang*, 21(4): 148-157.
- Haryadi , 2008. Sektor Pertanian Nasional. [Http://Ditjennak.Pertanian.Go.Id/](http://Ditjennak.Pertanian.Go.Id/). Diakses 9 April 2019.
- Ilham, N. 2009b. Kebijakan Pengendalian Harga Daging Sapi Nasional. *AKP*, 7 (3): 211- 221. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Jamali, 2000. Program Swasembada Daging Sapi Di Indonesia. [Http://Ditjennak.Pertanian.Go.Id/](http://Ditjennak.Pertanian.Go.Id/). Diakses 9 April 2019.
- Kementan. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Kementerian Pertanian , 2015. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015. http://www1.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf. Diakses 12/6/2019.
- Michael Porter , 1990. Daya saing.<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-daya-saing-menurut-para-ahli/>. Diakses Tanggal 12/6/2019.
- Mosher , 1996. Pertanian <https://www.inspirasipertanian.com/2018/11/pengertian-pertanian-menurut-para-ahli.html>. Diakses Tanggal 12/6/2019.
- Michael Porter ,1990. Keunggulan Kompetitif.https://Www.Academia.Edu/30037509/Sifat_Dan_Sumber_Keunggulan_Kompetitif.Pptx. Diakses 9 April 2019.
- Mutiara, Farah . 2013. "Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Subsidi Input Output Terhadap Pengembangan Komoditas Kedelai di Kabupaten Pasuruan". *Jurnal HABITAT*, Vol. XIV, No. 2, Agustus 2013.
- Sudirman. 2017." Analisis Sumber daya Domestik berdasarkan tipologi usaha ternak sapi bali:studi kasus kecamatan mayo hilir kabupaten sumbawa.". *Jurnal peternakan*, Vol.18 November 2017.
- Nugrohadi, 2009. Peternakan Dan Cara Membudidayakan Hasil Peternakan.[Http://Jpi.Faterna.Unand.Ac.Id/Index.Php/Jpi](http://Jpi.Faterna.Unand.Ac.Id/Index.Php/Jpi). Diakses 9 April 2019.

- Nazir, 2005. Kompetitif dan Pengaruh terhadap Kebijakan Pemerintah. https://id.wikipedia.org/wiki/Keunggulan_kompetitif. Diakses 9 April 2019.
- Pearson, Scott., Carl Gotsch, dan Sjaiful Bahri. 2005. Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pujitiasih Handini., Bustanul A, Suriaty S., 2014. "Analisis Posisi Dan Tingkat Ketergantungan Impor Gula Kristal Putih Dan Gula Kristal Rafinasi Indonesia Di Pasar Internasional". JIIA, Vol 2, No. 1, JANUARI 2014
- Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian. 2014. Statistik Makro Pertanian Tahun 2014. Buku Saku Makro Volume 6 No. 2 Tahun 2014. KEMENTAN.
- Rahim, 2007. Program Swasembada Daging Sapi Di Indonesia. <http://ditjennak.pertanian.go.id/>. Diakses 9 April 2019.
- Rahayu W, 2017. Model Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Aceh Di Kabupaten Aceh Jaya. Jurnal Peternakan Indonesia, Oktober 2017 Vol. 19 (3): 152 – 160 Thn 2017. Balai Pengkajian Teknologi Peratanian.
- Simanjuntak, 1992. Daya Saing Merupakan Kemampuan Suatu Komoditi Untuk Bersaing. https://www.researchgate.net/publication/283320984_Dinamika_Daya_Saing_Komoditas_Indonesia. Diakses 9 April 2019.
- Shah, 2007. Persaingan Pertanian Yang Terjadi Di Global. https://www.academia.edu/33491263/Daya_Saing_Pertanian. Diakses 9 April 2019.
- Salvatore, 1997. Ekspor Komoditi Dan Keunggulan Komparatif. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komparatif-dan-contohnya/>. Diakses 9 April 2019.
- Supardi, 2016. Analisis Ekonomi Usaha Ternak Sapi Potong Berbasis Agroekosistem Di Indonesia. Pertanian <http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomikaagriekonomika> a Volume 5, Nomor 2, 2016. Balai Peternakan Indonesia.
- Suratiyah, 2006. Program Swasembada Daging Sapi Di Indonesia. <http://ditjennak.pertanian.go.id/>. Diakses 9 April 2019.
- Wayan, 2004. Peternakan di Indonesia Program Swasembada Daging Sapi Di Indonesia. <http://ditjennak.pertanian.go.id/>. Diakses 9 April 2019.
- David Ricardo, 1817. TEORI KEUNGGULAN KOMPARATIF (COMPARATIVE ADVANTAGE). file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/TEORI_KEUNTUNGAN_KOMPARATIF.pdf. Diakses Tanggal 12/6/2019.

Day dan Wensley , 1988. MEMBANGUN KEUNGGULAN KOMPETITIF.
file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/4245-9197-1-SM.pdf. Diakses 9
April 2019.



LAMPIRAN

Lampiran 1

No	Spesies	Tahun (TON) SULSEL				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Daging Sapi	17.241.00	19.365.00	18.450.00	19.876.00	20.671.00
2	Sapi perah	1.464.00	1.464.00	1.529.00	1.594.00	1.659.00
3	Kerbau	1.086.00	2981.00	2.969.00	2.969.00	2.969.00
4	Kambing	14.470.00	15.147.00	15.858.00	16.620.00	17.483.00
5	Domba	650	0	0	0	0

Lampiran 2

No	Spesies	Tahun (Populasi Ekor) SULSEL				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Daging Sapi	2.100.137	1.284.442	2.100.137	1.284.442	1.366.655
2	Sapi perah	1.464	1.515	1.410	1.515	1.529
3	Kerbau	108.674	108.546	108.674	108.546	115.449
4	Kambing	466.084	443.792	437.918	477.068	466.393
5	Domba	1.371	815	490	468	377

Lampiran 3

Harga daging sapi (Rp/kg)	Tahun													
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Privat	40.000	47.500	50.500	54.500	61.500	62.500	65.000	72.700	92.000	95.000	97.000	100.000	105.000	120.000
Sosial	36.411	44.610	46.740	48.472	57.940	55.842	42.000	44.000	54.000	55.000	57.000	60.000	65.000	100.000

Lampiran 4

HARGA	HASI PRODUKSI		BIAYA USAHA	Penerimaan	Pendapatan
120.000	20.671,00	2,480,520,000	5,431,601.09	2,475,088,399	2,469,656,789
100.000	20.671,00	2,067,100,000	4,829,025.01	2,062,270,975	2,057,441,950

Lampiran 5

Keterangan	Penerimaan	BIAYA		Keuntungan
		Input Tradeable	Input Non Tradeable	
Harga Privat	A= 2,475,088,399	B= 1,161,204.09	C= 4,252,397	D= 2,469,674,798
Harga Sosial	E=2,062,270,975	F= 576,628.01	G=4,252,397	H= 2,057,441,950
Dampak				
Kebijakan/	I = 412,817,424	J =584,576.08	K =0	L =-1,169,152.08

Tabel 13. Perhitungan Analisis PAM usaha Peternakan Sapi Perah

Keterangan	Penerimaan	BIAYA		Keuntungan
		Input Tradeable	Input Non Tradeable	
Harga Privat	A= 27,748,399	B= 1,161,204.09	C= 4,252,397	D= 22,334,798
Harga Sosial	E=20,055,974	F= 576,628.01	G=4,252,397	H= 15,226,949
Dampak				
Kebijakan/	I = 7,692,425	J =584,576.08	K =0	L =- 1,169,154

Lampiran 6

HARGA	HASI PRODUKSI		BIAYA USAHA	Peenimaan	Pendapatan
20,000	1.659.00	33,180,000	5,431,601.09	27,748,399	14,624,373.99
15,000	1.659.00	24,885,000	4,829,025.01	20,055,974	15,226,949



Lampiran 7

Input	Satuan	Input Tradable/Non Tradable	
		Biaya Sapi Perah	
		Privat	Sosial
Faktor			
Tenaga Kerja	Rp./JOK/Thn	3,108,695	3,108,695
Lahan	Rp./Ha/Thn	234,565	234,565
Bunga bank	Rp/thn	909,137	909,137
CR Kandang		4,252,397	4,252,397
a. Bambu		2,827.82	2,827.82
b. Kayu		50,900.83	50,900.83
c. Pagar hidup		16,966.94	16,966.94
d. Kawat tali		701.44	666.37
e. Kereta sorong		62.300	30.700
f. Ember		14.800	5.900
g. Kandang		443.300	170.000
Pakan		591,794.96	303,404.96
a. Hijauan		651.57	651.57
b. Bahan kering		301.93	301.93
		953.5	953.5
CR Pralatan	Rp./ST/Thn		
a. Parang		20,289.86	17,584.54
b. Senter		18,840.58	15,072.46
c. Bak/ember		6,280.19	5,212.56
d. Tali		7,000.00	5,833.33
Pengangkutan	Rp./ST/Thn	62,500.00	23,333.33
Penanganan		50,000.00	13,333.33
Ternak			
a. Obat-obatan		216.500	87.900
b. Vitamin		45.600	14.000
c. Suntik IB		187.000	90.000
		568,455.63	272,269.55
Input Tradable		1,161,204.09	576,628.01
Input Non Tradable		4,252,397	4,252,397
Jumlah Biaya Sapi Potong		5,431,601.09	4,829,025.01

Lampiran 8

Input	Satuan	Input Tradable/Non Tradable	
		Biaya Sapi Potong	
		Privat	Sosial
Faktor			
Tenaga Kerja	Rp./JOK/Thn	3,108,695	3,108,695
Lahan	Rp./Ha/Thn	234,565	234,565
Bunga bank	Rp/thn	909,137	909,137
CR Kandang		4,252,397	4,252,397
a. Bambu		2,827.82	2,827.82
b. Kayu		50,900.83	50,900.83
c. Pagar hidup		16,966.94	16,966.94
d. Kawat tali		701.44	666.37
e. Kereta sorong		62.300	30.700
f. Ember		14.800	5.900
g. Kandang		443.300	170.000
Pakan		591,794.96	303,404.96
a. Hijauan		651.57	651.57
b. Bahan kering		301.93	301.93
		953.5	953.5
CR Pralatan	Rp./ST/Thn		
a. Parang		20,289.86	17,584.54
b. Senter		18,840.58	15,072.46
c. Bak/ember		6,280.19	5,212.56
d. Tali		7,000.00	5,833.33
Pengangkutan	Rp./ST/Thn	62,500.00	23,333.33
Penanganan		50,000.00	13,333.33
Ternak			
a. Obat-obatan		216.500	87.900
b. Vitamin		45.600	14.000
c. Suntik IB		187.000	90.000
		568,455.63	272,269.55
Input Tradable		1,161,204.09	576,628.01
Input Non Tradable		4,252,397	4,252,397
Jumlah Biaya Sapi Potong		5,431,601.09	4,829,025.01

Lampiran 9

Kabupaten/Kota	2015					
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Kepulauan Selayar	1009	238	71	4480	2	-
Bulukumba	6035	31	754	7970	-	-
Bantaeng	1814	-	819	6523	-	-
Jeneponto	625	112	2542	1038	38	-
Takalar	2378	45	5	2418	-	-
Gowa	12606	182	360	4794	-	9853
Sinjai	5783	6	37	4975	-	-
Maros	2509	5	297	959	-	-
Pangkep	2874	370	177	7585	-	-
Barru	2201	41	182	589	-	-
Bone	7118	-	500	632	-	-
Soppeng	3402	62	69	2206	-	37
Wajo	9746	375	110	4290	-	-
Sidrap	8725	15	-	1314	-	-
Pinrang	3492	6	2	2411	-	256
Enrekang	6573	25	114	4226	-	-
Luwu	2241	320	-	3614	-	2349
Tana Toraja	249	3817	-	109	-	20155
Luwu Utara	2000	30	-	628	-	-
Luwu Timur	3768	25	-	977	-	1334
Toraja Utara	36	7468	5	1	-	26789
Makassar	29660	401	25	2487	-	-
Pare Pare	2404	68	8	410	-	-
Palopo	3356	18	-	387	-	87
SULAWESI SELATAN	120604	13660	6077	65023	40	60860















